



PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN BARU JERMAN

(THE FORMING OF NEW GERMANY GOVERNMENT)

SKRIPSI

Oleh:

LENI ROSAPRILIYA PUTRI

NIM 140910101055

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2018



PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN BARU JERMAN

(THE FORMING OF NEW GERMANY GOVERNMENT)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

LENI ROSAPRILIYA PUTRI

NIM 140910101055

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho dan karunia dari Allah SWT, dengan ikhlas kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Saiful, Ayahanda Ifan Lazim, Ibunda Endang Haryani, adik saya Cornelia Rossa Fitriandani dan Muhammad Farizqi yang saya sayangi dan saya banggakan;
2. Ibu Sartik dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Angie Wahyudi Wicaksono yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;
4. Sahabat seperjuangan: Camellia Nadhifatul Abror dan Dea Prastiwi W yang telah menjadi tempat untuk berbagi;
5. Seluruh keluarga besar Ilmu Hubungan Internasional khususnya Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2014 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam mencari ilmu;
6. Guru-guruku mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah senantiasa membagikan ilmunya dan memberikan bimbingan selama ini;
7. Almamater tercinta Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita”

(Emha Ainun Nadjib)¹



¹ NU. 2017. Jika Tak Terkait Pilkada Tak Usah Ikut-Ikut. www.nu.or.id. [Diakses pada tanggal 2 Juni 2018]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Rosapriya Putri

NIM : 140910101055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pembentukan Pemerintahan Baru Jerman” adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan untuk institusi lain, dan bukanlah karya hasil menjiplak. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juni 2018

Yang menyatakan:

Leni Rosapriya Putri

NIM 140910101055

SKRIPSI

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN BARU JERMAN

(THE FORMING OF NEW GERMANY GOVERNMENT)

Oleh:

Leni Rosapriliya Putri

NIM. 140910101055

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Supriyadi, M.Si

Dosen Pembimbing II : Dr. Puji Wahono, M.Si

PENGESAHAN



RINGKASAN

Pembentukan Pemerintahan Baru Jerman; Leni Rosapriya Putri; 140910101055; 2018; 122 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Pada bulan September 2017, Jerman melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota *Bundestag*. Berdasarkan hasil perolehan pemilihan umum tersebut fraksi Union (gabungan Partai CDU dan Partai CSU) memenangkan pemilihan umum dengan perolehan 246 kursi. Sedangkan urutan kedua di menangkan oleh Partai SPD yang berhasil memperoleh 153 kursi. Kemudian Partai AfD yang berhasil memasuki parlemen untuk pertama kalinya mendapatkan 94 kursi. Posisi keempat disusul dengan jumlah kursi Partai FDP sebanyak 80 kursi, 69 kursi untuk Partai *Die Linke*, dan 67 jumlah kursi bagi Partai Hijau. Dengan demikian, total jumlah kursi dalam *Bundestag* pada pemilihan umum 2017 sebesar 709 kursi. Kemenangan Partai CDU akhirnya membuat Angela Merkel kembali menempati jabatan Kanselir di Jerman. Berdasarkan perolehan jumlah kursi yang diraih oleh fraksi Union, jumlah tersebut masih belum mencapai setengah kursi mayoritas dalam *Bundestag*. Kondisi itu membuat Partai CDU harus membentuk koalisi dengan partai politik lain. Namun menariknya, ajakan koalisi Partai CDU sebagai partai yang memenangkan pemilihan umum mengalami hambatan. Sejumlah partai politik yang berhasil masuk *Bundestag* pada pemilihan umum tahun 2017 tidak menunjukkan keinginan mereka untuk bergabung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dalam membentuk pemerintahan baru Jerman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *literature research*, dimana untuk pengumpulan data menggunakan data sekunder yang berasal dari media cetak, situs internet atau website resmi, buku cetak maupun elektronik (e-book). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data-data tersebut dianalisis, kemudian di deskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh terkait permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan Partai CDU dalam membentuk pemerintahan baru Jerman dipengaruhi oleh perdebatan kebijakan antar partai. Dalam penelitian ini penulis memetakan tujuh alternatif koalisi sebagai langkah Partai CDU dalam mencari *partner* koalisi. Antara lain, fraksi Union-AFD-*Die Linke*, Union-Partai Hijau-AFD, Union-FDP-AFD, Union-FDP-*Die Linke*, Union-Partai Hijau-*Die Linke*, Union-SPD (Koalisi Besar), dan Union-FDP-Partai Hijau (Koalisi Jamaika). Kesulitan Partai CDU terletak pada Partai AfD dan Partai *Die Linke*. Partai CDU merupakan partai politik berhaluan demokrasi liberal atau partai tengah-kanan di Jerman. partai ini cenderung mengakui adanya hak-hak individu, kebebasan dalam beragama, dan solidaritas yang tinggi. Sedangkan Partai AfD adalah partai sayap kanan yang cenderung radikal. Partai ini mendukung gerakan anti-Islam dan anti-pengungsi di Jerman. Kemudian bila dibandingkan dengan ideologi Partai *Die Linke*, partai ini menganut ideologi sosialis, cenderung anti pada kapitalisme dan anti privatisasi. Ideologi ini berbeda dengan Partai CDU yang lebih liberal. Kemudian hambatan karena faktor kebijakan, kesulitan Partai CDU terletak pada Partai SPD dan Partai FDP. Pasca pemilihan umum 2017, Partai SPD memilih menjadi partai oposisi dan tidak ingin membangun koalisi dengan Partai CDU. Selain itu muncul ketidaksepakatan terkait masalah kebijakan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Sedangkan Partai FDP tidak ingin membangun koalisi dengan CDU karena tidak memiliki kesamaan visi misi dalam rencana kebijakan energi di Jerman.

Munculnya hambatan ini membuat Presiden Jerman akhirnya membantu dalam upaya membangun koalisi dengan Partai SPD. Upaya ini membuat negosiasi mencapai kata sepakat. Beberapa kesepakatan koalisi ini karena adanya alokasi jabatan menteri yang diberikan pada Partai SPD. Seperti, menteri luar negeri, menteri ketenagakerjaan, dan menteri keuangan yang seharusnya dipegang oleh partai pemenang pemilihan umum. Kesepakatan lain, yaitu adanya pembatasan pengungsi dan peningkatan lapangan kerja. Berdasarkan hasil koalisi tersebut, Partai CDU dan Angela Merkel cenderung terlihat sedikit mengabaikan tujuan partainya demi mewujudkan koalisi dengan Partai SPD.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya-Nya serta sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembentukan Pemerintahan Baru Jerman”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasihat, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardianto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Supriyadi, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan saran, nasihat dan perhatiannya selama penulis menjadi mahasiswa bimbingannya;
4. Dr. Puji Wahono, M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan ilmunya baik berupa saran, nasihat-nasihat dan waktunya yang sangat membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Panuluh selaku operator Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang selalu membantu memberikan informasi;
7. Kedua orang tua dan kedua adik saya yang selalu mendukung dalam hal apapun;

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Jember, 8 Juni 2018

Penulis



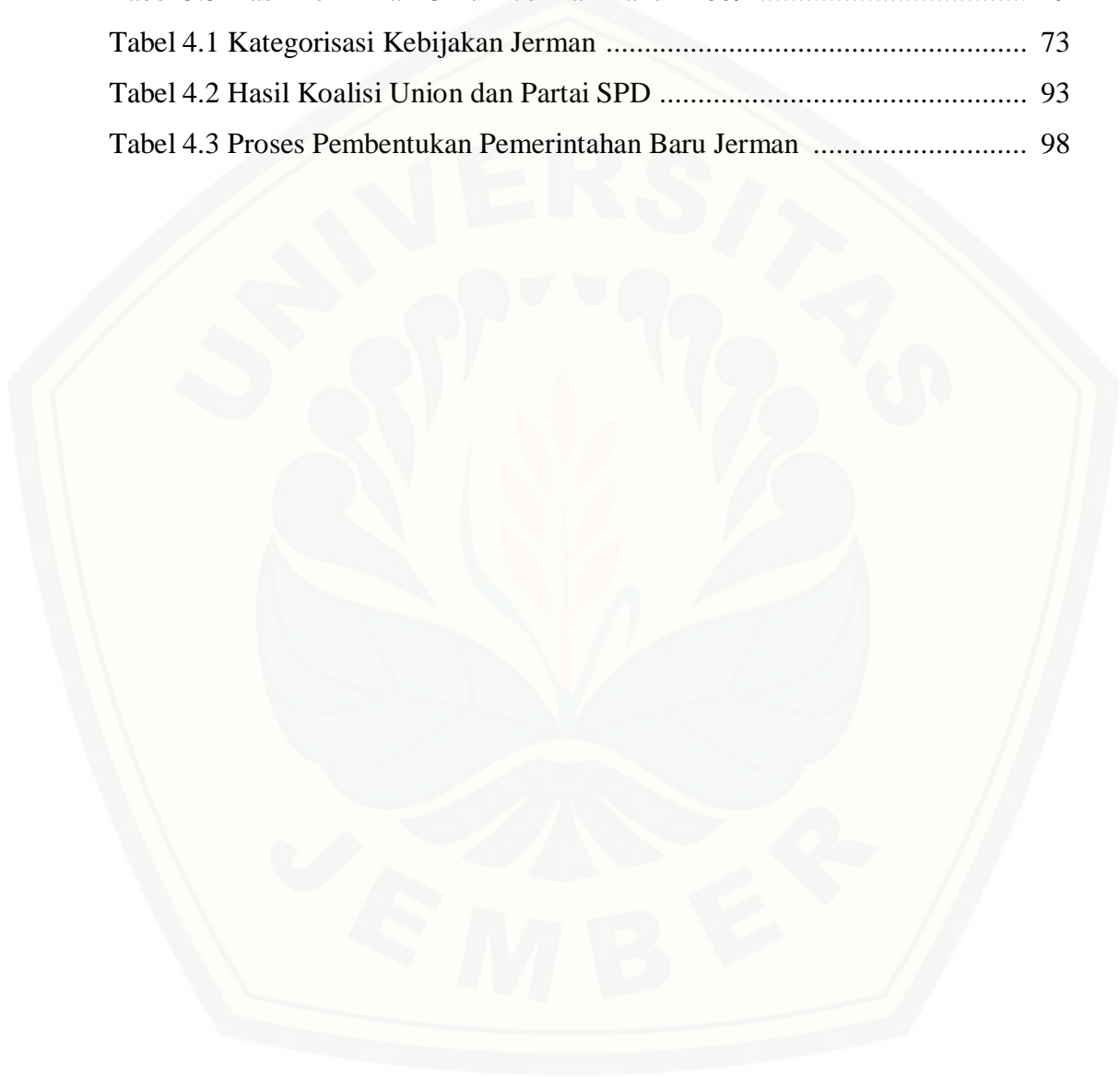
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi.....	6
1.2.2 Batasan Waktu.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Landasan konseptual.....	8
1.5.1 Konsep Koalisi Partai Politik	8
1.6 Argumen Utama	11
1.7 Metode Penelitian	12
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	13
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	13
1.8 Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2. PETA KEPARTAIAN DI JERMAN.....	16
2.1 Christlich Demokratische Union (CDU).....	18

2.2	Christlich Soziale Union (CSU)	20
2.3	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	21
2.4	Partai Kiri (<i>Die Linke</i>).....	22
2.5	Partai Hijau (<i>The Green-Die Grunen</i>).....	26
2.6	Partai Liberal Jerman (<i>Freie Demokratische Partei</i> atau FDP). ..	28
2.7	<i>Alternative fur Deutschland</i> (AfD)	29
BAB 3.	PEMILIHAN UMUM JERMAN TAHUN 2017	33
3.1	Sistem Pemilihan Umum Jerman.....	33
3.2	Kemenangan Angela Merkel pada Pemilihan Umum Jilid 1-III	45
3.2.1	Pemilihan Umum Jerman Tahun 2005.....	45
3.2.2	Pemilihan Umum Jerman Tahun 2009.....	47
3.2.3	Pemilihan Umum Jerman Tahun 2013.....	48
3.3	Hasil Pemilihan Umum Jerman Tahun 2017.....	50
BAB 4.	HAMBATAN DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN BARU	
	JERMAN	70
4.1	Hambatan Partai CDU untuk Berkoalisi	73
4.2	Koalisi Pemerintahan Baru Jerman	88
BAB 5.	PENUTUP	112
5.1	Kesimpulan	112
DAFTAR PUSTAKA.....		114

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Des Grundgeretz Pemilu dan Praktiknya	41
Tabel 3.2 Hasil Pemilihan Umum Jerman Tahun 2005	46
Tabel 3.3 Hasil Pemilihan Umum Jerman Tahun 2009	49
Tabel 4.1 Kategorisasi Kebijakan Jerman	73
Tabel 4.2 Hasil Koalisi Union dan Partai SPD	93
Tabel 4.3 Proses Pembentukan Pemerintahan Baru Jerman	98



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Wilayah 16 Negara Bagian Jerman	16
Gambar 2.2 Logo Partai <i>Christlich Demokratische Union (CDU)</i>	18
Gambar 2.3 Logo Partai <i>Christlich Soziale Union (CSU)</i>	20
Gambar 2.4 Logo Partai <i>Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)</i>	22
Gambar 2.5 Logo Partai Kiri (<i>Die Linke</i>)	24
Gambar 2.6 Logo Partai Hijau (<i>The Greens - Die Grünen</i>)	27
Gambar 2.7 Logo Partai Liberal Jerman	29
Gambar 2.8 Logo Partai <i>Alternative für Deutschland (AfD)</i>	30
Gambar 3.1 Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Jerman	38
Gambar 3.2 Hasil Pemilihan Umum Jerman Tahun 2009	47
Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Jerman 1976-2017	50
Gambar 3.4 Hasil Akhir Pemilu Jerman (Persentase)	51
Gambar 3.5 Hasil Pemilu (709 kursi <i>Bundestag</i>)	52
Gambar 3.6 Persebaran Suara Fraksi Union	53
Gambar 3.7 Persebaran Suara Partai SPD	55
Gambar 3.8 Persebaran Suara Partai AfD	56
Gambar 3.9 Perbandingan Pemilu 2013 dengan Pemilu 2017	57
Gambar 3.10 Perbandingan Presentase Perolehan Suara	59
Gambar 3.11 Suara Partai (<i>Zweitstimme</i>) Pemilu 2013 dan 2017	60
Gambar 3.12 Perpindahan Suara Union 2017	62
Gambar 3.13 Perpindahan Suara Partai SPD 2017	63
Gambar 3.14 Perpindahan Suara Partai FDP 2017	64
Gambar 3.15 Perpindahan Suara Partai Hijau 2017	65
Gambar 3.16 Perpindahan Suara Partai AfD 2017	66
Gambar 3.17 Perpindahan Suara Partai <i>Die Linke</i> 2017	68
Gambar 4.1 Kemungkinan Koalisi	72
Gambar 4.2 Peluang Koalisi 1	75
Gambar 4.3 Peluang Koalisi 2	76
Gambar 4.4 Peluang Koalisi 3	76

Gambar 4.5 Peluang Koalisi 4	77
Gambar 4.6 Peluang Koalisi 5	78
Gambar 4.7 Alternatif Koalisi Tanpa Partai AfD	82
Gambar 4.8 Alokasi Menteri Jerman (2005-2018)	91



DAFTAR SINGKATAN

NAZI : *Nationalsozialismus*

Pemilu : Pemilihan Umum

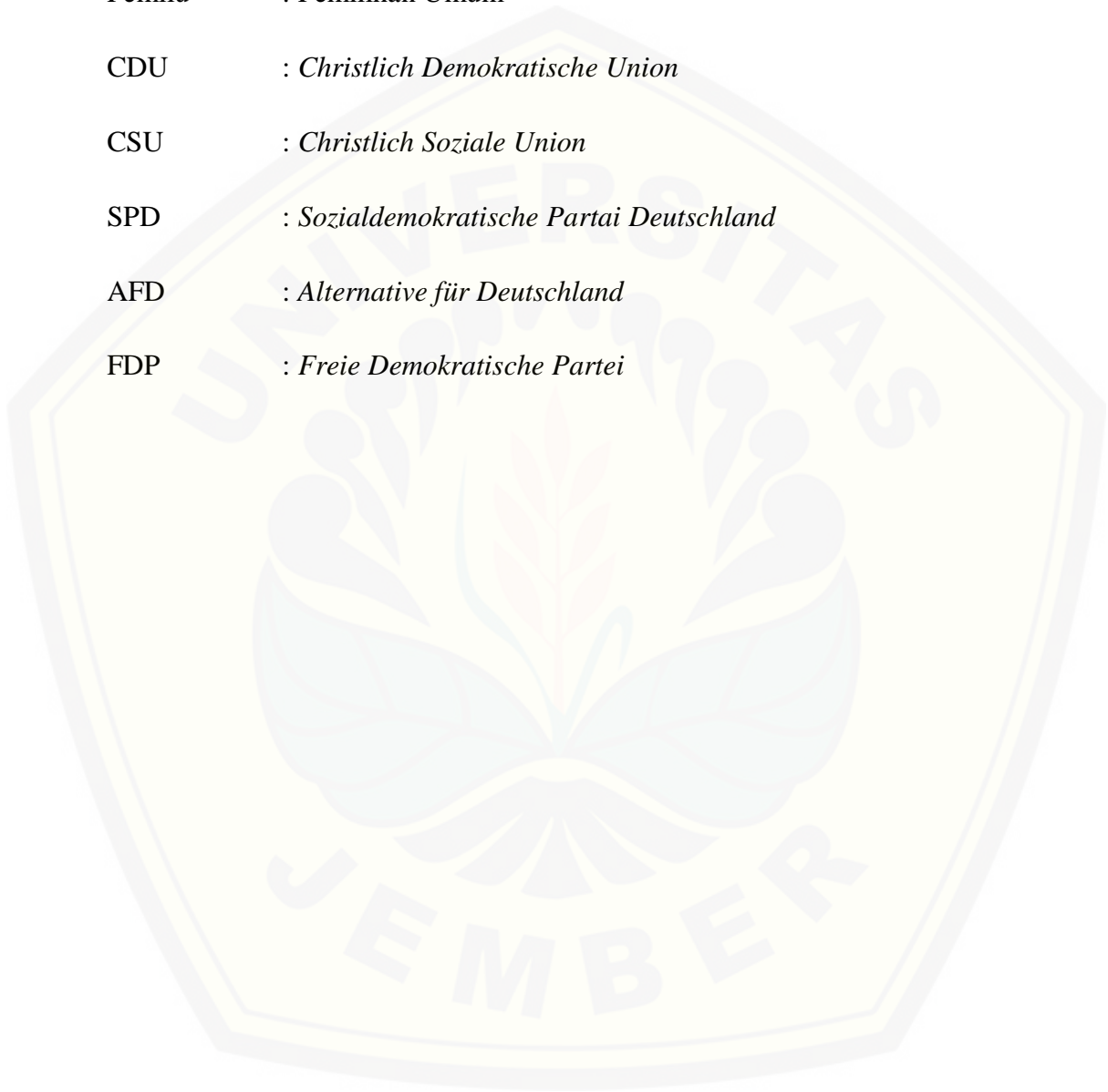
CDU : *Christlich Demokratische Union*

CSU : *Christlich Soziale Union*

SPD : *Sozialdemokratische Partei Deutschland*

AFD : *Alternative für Deutschland*

FDP : *Freie Demokratische Partei*



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Jerman adalah negara yang terletak di kawasan benua Eropa. Negara ini memiliki nama resmi *Bundesrepublik Deutschland* atau *Federal Republic of Germany* ini termasuk salah satu negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Walaupun dalam sejarahnya negara ini pernah dipimpin oleh NAZI¹ yang menganut rezim otoriter. Karena rezim tersebut membawa kehancuran bagi Jerman pada Perang Dunia II dan membuat Jerman kehilangan wilayah Jerman Timur, maka setelah bersatunya kembali wilayah Jerman pada 1990, akhirnya Jerman merubah sistem pemerintahannya menjadi lebih demokratis. Secara konstitusional, negara Jerman dipimpin oleh seorang Kanselir yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan presiden sebagai kepala negara. Selain itu, terdapat lima prinsip yang dianut Jerman menjadi acuan ketatanegaraannya, yaitu bahwa Jerman adalah negara republik dan menganut sistem demokrasi, negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian, sebagai negara hukum, dan negara yang sosial (Kemdikbud, 2003).

Jerman sebagai negara yang federal, terdiri dari 16 negara bagian (*Länder*) yang menerapkan sistem parlemen dua kamar (bikameral). Dalam sistem parlemen bikameral, pada tingkat federal terdapat majelis rendah (*Bundestag*) sementara perwakilan negara bagian masuk dalam majelis tinggi (*Bundesrat*). *Bundestag* merupakan parlemen tingkat federal yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Menurut fungsinya, *Bundestag* dapat memilih Kanselir yang akan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan, membentuk undang-undang bersama pemerintah serta mengawasi jalannya pemerintahan federal. Sedangkan *Bundesrat* adalah semacam Senat yang anggotanya berfungsi memperjuangkan kepentingan dari masing-masing negara

¹ NAZI (*Nationalsozialismus*) adalah kekuatan politik utama di Jerman sejak tahun 1933 hingga akhir Perang Dunia II tahun 1945. Penganut NAZI adalah orang-orang yang berhaluan ekstrem kanan dan rasisme. (German Federal Foreign Office. 2008. *Facts about Germany*. Berlin: Frankfurt Societäts Medien-GmbH. hal 61-67).

bagian di tingkat federal. Anggota *Bundesrat* berasal dari perwakilan 16 negara bagian. Selain itu, *Bundesrat* juga menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan pemerintah federal bersama *Bundestag* (German Federal Foreign Office, 2008: 15).

Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan oleh seorang Kanselir yang pada tahapan sebelumnya sudah dimusyawarahkan bersama anggota parlemen. Adanya pembatasan kekuasaan di Jerman antara presiden dan Kanselir membuat pemerintahan negara ini cenderung kondusif. Presiden di Jerman dapat membubarkan parlemen dan melangsungkan pemilihan umum baru jika parlemen tidak bisa mempercayai kanselir. Selain itu peran presiden adalah untuk mengawasi implementasi Undang-Undang yang sejalan dengan konstitusi dan memiliki hak pemberian pengampunan (DW, 2010). Hal ini tentunya berbeda dengan peran kanselir, dimana pada dasarnya kanselir adalah kepala pemerintahan dan presiden adalah kepala negara Jerman.

Sebagai negara demokrasi, partai di Jerman sangat mempunyai peran penting dalam mewakili pendapat masyarakatnya. Selain itu Jerman juga termasuk negara yang menganut sistem multipartai. Terdapat 6 partai politik utama di Jerman yang terdiri dari 3 partai politik yang mendominasi, yaitu *Christlich Demokratische Union (CDU)*, *Christlich Soziale Union (CSU)*, *Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)*, Partai Hijau yang berfokus pada isu-isu lingkungan, *Die Linke* yang berhaluan radikal kiri, dan *Freie Demokratische Partei (FDP)*. Partai CSU merupakan partai lokal dan hanya ada di negara bagian *Bayern (Bavaria)*. Karena mempunyai ideologi partai yang sama, maka Partai CDU dan Partai CSU bekerja sama secara permanen ditingkat federal dan membentuk fraksi bersama di tingkat parlemen. Oleh karena itu, fraksi kedua partai tersebut seringkali disebut dengan CDU-CSU (fraksi Union).

Parlemen Jerman sebelum pemilihan umum tahun 2017 didominasi oleh Partai CDU dan Partai CSU yang berkoalisi secara permanen dalam pemerintahan. Koalisi partai ini memperoleh hingga 309 kursi dari 630 total kursi di parlemen. Kemudian di posisi kedua diraih oleh Partai SPD dengan capaian

193 (Koran Harian Kompas, 2017). Ketiga partai tersebut kemudian berkoalisi setelah 2 bulan pascapemilihan umum tanggal 22 September 2013.

Sistem pemilihan umum (pemilu) di Jerman menerapkan sistem *proportional representation*, sistem ini tidak memungkinkan adanya partai politik yang mampu meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum kemudian menjadi *single majority*. Selain itu, sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia dan demokrasi, Jerman menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) setiap 4 tahun sekali untuk memilih kanselirnya dalam memimpin pemerintahan. Kandidat utama partai yang menang dalam pemilu akan menjabat sebagai Kanselir di Jerman. Sejak tahun 2005, Angela Merkel dari Partai *Christlich Demokratische Union (CDU)* terpilih menjadi Kanselir, sehingga sejak saat itu ia selalu mendominasi pemerintahan. Meskipun Angela Merkel masih memenangi pemilihan umum pada pemilihan umum tanggal 24 September 2017, namun yang menarik kemenangan tersebut disusul Partai *Alternatif (AfD)* yang berorientasi ultra kanan pada urutan ketiga setelah Partai CDU-CSU dan Partai SPD. Ideologi yang berkaitan dengan *NAZI* ini tentunya sangat bertentangan dengan Partai CDU dan Partai CSU yang lebih konservatif.

Dalam sistem parlementer di negara Jerman, fungsi *Bundestag* yang lain yaitu mempunyai wewenang dalam mengawasi jalannya pemerintahan federal dan dapat mengeluarkan mosi tidak percaya. Hal itu dapat berakibat pada dipercepatnya pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu diperlukan koalisi diantara partai-partai politik dalam membentuk pemerintahan. Dengan terbentuknya koalisi tersebut maka akan dapat meminimalkan tekanan oposisi dalam parlemen agar pelaksanaan pemerintahan yang baru dapat berjalan lebih efektif. Kondisi ini disebabkan karena sistem pemilihan umum Jerman (*electoral system*) yang menyulitkan partai politik membentuk pemerintahan minoritas. Pemilihan Kanselir oleh *Bundestag* memaksa partai untuk berkoalisi agar semakin memperkuat legitimasi. Demikian juga ketika Kanselir membentuk kabinet dan menjalankan pemerintahan baru.

Komposisi perolehan suara pascapemilu yang diselenggarakan Jerman pada tanggal 2017, menunjukkan bahwa gabungan Partai CDU dan Partai CSU

menempati perolehan tertinggi sebesar 32,9% suara. Sedangkan Partai SPD yang memilih menjadi partai oposisi memperoleh suara sebesar 20,8%, atau berada di peringkat kedua. Pada peringkat ketiga disusul oleh Partai AfD yang berhaluan ultrakanan sebesar 13,1%. Lalu Partai FDP 10,5% suara, dan Partai Hijau serta Partai *Die Linke* (berhaluan kiri) yang masing-masing memperoleh 8,9% suara (BBC, 2017).

Kondisi tersebut membuat Partai AfD meraih kursi di parlemen dan menempati posisi ketiga sebagai partai besar di Jerman. Perolehan kursi parlemen pasca pemilihan umum tahun 2017 menunjukkan hasil gabungan Partai CDU dan Partai CSU yang mendapatkan suara sebanyak (246), SPD (153), AfD (94), FDP (80), Partai Kiri (69), dan Partai Hijau (67) (Koran Harian Kompas 2017). Dengan perolehan tersebut, Angela Merkel yang menjabat sebagai kanselir untuk keempat kalinya, harus mencari koalisi untuk meraih dukungan mayoritas absolut di parlemen yang membutuhkan setengah lebih dari total kursi. Namun demikian, Partai SPD yang sebelumnya pernah berkoalisi, kali ini memilih menjadi partai oposisi (BBC Indonesia, 2017). Partai lain seperti FDP dan Partai Hijau memungkinkan terciptanya kekuatan yang stabil dalam parlemen jika hal ini menjadi langkah kedua bagi Partai CDU untuk berkoalisi. Tetapi Partai FDP masih tidak menunjukkan keinginannya untuk berkoalisi mendukung Angela Merkel (Kompas, 2017). Bahkan pada Minggu tanggal 19 November 2017, Partai FDP menyatakan mundur dari negosiasi pembentukan koalisi pemerintahan dengan Partai CDU, Partai CSU dan Partai Hijau yang mendukung Angela Merkel (Aipassa, 2017). Negosiasi ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Partai CDU walaupun pada akhirnya mengalami kegagalan.

Menurunnya pendukung Partai CDU dan semakin berkembangnya pendukung dan kelompok ultra kanan, terutama masuknya Partai AfD dalam parlemen membuat pemerintah lebih hati-hati menyikapi politik di Jerman. Apalagi partai Alternatif ini selalu menyoroti masalah kebijakan Angela Merkel terkait imigran dan anti-islam. Kondisi ini semakin membuat Partai CDU harus berkoalisi untuk mendapatkan legitimasi di parlemen, guna mengurangi kelompok

oposisi yang menentang kebijakan Partai CDU yang menaungi Angela Merkel sebagai kanselir Jerman.

Langkah Angela Merkel untuk membentuk suatu koalisi dilakukan melalui perundingan awal terhadap “Koalisi Jamaika” yang terdiri dari Partai CDU, Partai CSU, Partai Hijau, dan Partai FDP. Langkah Angela Merkel ini menjadi suatu tekanan yang kuat kepada Partai SPD sebagai partai oposisi. Namun usaha itu mengalami kegagalan karena Partai FDP enggan berkoalisi. Pihak Angela Merkel berencana kembali melakukan perundingan sebagai upaya mengakhiri kebuntuan politik negara Jerman.

Terdapat beberapa poin penting dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Angela Merkel, terutama mengenai isu imigran. Hal tersebut cenderung menimbulkan perbedaan pendapat dan tujuan antar partai politik di Jerman. Partai SPD yang memilih menjadi partai oposisi membuat Partai CDU dan Partai CSU kehilangan koalisinya. Alternatif “Koalisi Jamaika” menjadi peluang yang baik bagi koalisi Partai CDU dan Partai CSU. Namun demikian, di tingkat pemerintah federal, koalisi ini belum pernah terwujud. Apalagi hubungan Partai FDP dan Partai Hijau tidak baik. Kondisi tersebut membuat perundingan akan sulit dan memerlukan waktu yang lama (DW made for minds, 2017). Tidak adanya kesepakatan diantara kedua pihak membuat Partai CDU dan Angela Merkel sulit berkoalisi.

Pengertian partai politik adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan dan ideologi yang sama. Selain itu salah satu tujuan partai politik adalah untuk mencari kekuasaan di dalam pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan tersebut melalui pemilihan umum. Dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk melaksanakan program-program yang sudah mereka susun demi masyarakat di dalam negaranya dengan ideologi tertentu. Program-program tersebut selalu ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, di Jerman Partai CDU masih mengalami kesulitan untuk berkoalisi dengan partai lain. Padahal kemenangan Angela Merkel dari Partai CDU membuat perundingan koalisi dengan partai-partai lain menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Terkait dengan tujuan partai, seharusnya partai-partai

lain di Jerman memilih untuk melakukan koalisi dengan Partai CDU untuk mencari kekuasaan di dalam pemerintahan.

Partai CDU dan Angela Merkel yang memenangkan pemilu 2017 menjadi tokoh politik utama di Jerman. Hal ini membuat tujuan Partai CDU untuk menjadi partai politik yang mendominasi tercapai. Namun menariknya, ajakan koalisi Partai CDU terhadap partai-partai lain mengalami hambatan karena tidak adanya keinginan untuk bergabung dalam menjalankan pemerintahan bersama. Dengan demikian, dalam pembentukan pemerintahan baru Jerman pasca pemilu 2017 terdapat faktor-faktor penghambat yang membuat koalisi antar partai menjadi sulit untuk dilakukan. Hal itu memunculkan suatu perbedaan antara kenyataan dan apa yang seharusnya terjadi. Hal ini menjadi alasan penulis untuk lebih meneliti faktor yang menjadi hambatan Partai CDU dalam membentuk pemerintahan baru Jerman.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam sebuah penelitian ilmiah sangatlah penting. Hal ini karena ruang lingkup pembahasan dapat membantu penulis untuk tetap fokus pada pembahasan penelitian. Selain itu, ruang lingkup juga dapat membantu penulis untuk lebih mempertegas apa yang ingin disampaikan melalui penelitiannya dan dapat membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian. Terdapat dua ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu lingkup materi dan lingkup waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi digunakan penulis untuk membatasi bahasan karya ilmiah. Fungsi utama dari batasan materi adalah untuk memberikan fokus yang jelas terhadap penulis dan pembaca. Pada karya ilmiah ini penulis memfokuskan bahasan pada sebab-sebab atau faktor yang menyebabkan Partai CDU tidak mudah memperoleh *partner* koalisi dalam pemerintahan Jerman. Penulis membahas kajian pustaka mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terbentuknya koalisi Partai CDU dengan partai-partai lain, terutama

pasca Pemilu 2017. Dengan demikian penulis juga menjelaskan proses terbentuknya pemerintahan baru di Jerman, serta menjelaskan perbedaan-perbedaan yang muncul dari enam partai dominan di Jerman.

1.2.2 Lingkup Waktu

Batasan waktu digunakan penulis untuk memberi ukuran ataupun batasan periode dari berlangsungnya sebuah fenomena yang diteliti oleh peneliti. Batasan waktu yang diambil dalam penelitian ini dimulai pada awal dilaksanakannya Pemilu di Jerman pada tanggal 24 September 2017 yang dimenangkan oleh Angela Merkel. Kemudian batasan waktu akhir yang diambil oleh penulis adalah pada tahun 2018. Penulis membandingkan selisih waktu antara pemilihan umum tanggal 22 September 2013 dengan tahun 2017 di Jerman. Pada 2013, koalisi Partai CDU dengan Partai SPD terjadi setelah 2 bulan pasca pemilu. Namun demikian pasca pemilu 2017, partai CDU masih memiliki hambatan untuk berkoalisi dengan partai lain selama 5 bulan pasca pemilu 2017. Kondisi ini menjadi ukuran penulis dalam batasan waktu penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2001) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Perumusan masalah diperoleh dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Dari latar belakang tersebut, kemudian muncul permasalahan yang harus di temukan penyelesaiannya melalui proses penelitian. Hal ini kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah **bagaimana proses pembentukan pemerintahan baru Jerman?**

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas dalam sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah pada saat seorang peneliti melakukan

aktifitas penelitiannya agar dalam proses tersebut peneliti tidak keluar atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pada setiap penelitian tahapan pertamanya adalah menentukan atau memilih pokok masalah yang akan diteliti. Biasanya, dalam pokok permasalahan tersebut telah terhubung dalam judul atau topik suatu penelitian”, (Faisal, 2005: 52). Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan pemerintahan baru Jerman, dan untuk mengetahui faktor penghambat Partai CDU dalam membentuk pemerintahan baru Jerman meskipun telah memenangkan Pemilu di tahun 2017. Selain itu menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Partai CDU untuk mendapatkan koalisi, dan menemukan berbagai faktor yang menjadi penghambat Partai CDU untuk berkoalisi.

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 Konsep Koalisi Partai Politik

Dalam pengertiannya, koalisi adalah suatu bentuk penggabungan. Koalisi merupakan suatu bentuk interaksi kelompok individu yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, yang terdiri dari keanggotaan yang di dalamnya saling menguntungkan satu sama lain, berorientasikan pada masalah atau isu, memfokuskan pada tujuan-tujuan lain di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama dari para anggotanya. Sedangkan dalam pengertian politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk satu pemerintahan bersama. Koalisi merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari dalam proses pemerintahan yang menganut sistem multipartai (Lijphart, 1995: 231).

Dalam sistem pemerintahan yang menganut multipartai, koalisi adalah suatu bentuk untuk membangun pemerintahan negara yang kuat. Fungsi terciptanya koalisi antar partai politik adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*) legitimasinya, mandiri (*autonomuos*), dan tahan lama (*durable*). Namun demikian seringkali koalisi yang dibangun membingungkan.

Kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan apabila dibangun atas landasan pemikiran yang realitis dan layak (Bambang, 2000: 22).

Berdasarkan jenisnya, koalisi terbagi menjadi beberapa pengertian, yaitu:

- a) Koalisi potensial, yaitu koalisi yang terjadi jika ada kepentingan yang muncul dari beberapa kelompok tertentu sehingga berpotensi untuk membentuk koalisi. Koalisi jenis ini bersifat *latent* (belum terbentuk menjadi koalisi aktif) dan *dormant* (pernah terbentuk sebelumnya, tetapi sudah tidak aktif).
- b) Koalisi aktif (*operating*), yaitu koalisi yang sedang berjalan. Koalisi ini dibagi menjadi dua, yaitu koalisi mapan (*established*), merupakan koalisi yang aktif, relatif stabil, dan berlangsung dalam rentang waktu terbatas, dan koalisi temporer (*temporary*) adalah koalisi yang dibentuk untuk jangka pendek, dan fokus pada isu tunggal.
- c) Koalisi berulang (*recurring*), yaitu koalisi temporer yang berlanjut karena masih belum menyelesaikan suatu isu.

Sedangkan menurut Pridham (1987: 185-194), konsepnya dapat menjelaskan terbentuknya suatu dinamika dan proses koalisi partai politik. Dalam proses koalisi tersebut, partai politik cenderung akan lebih mempertimbangkan beberapa faktor yang digunakan dalam memahami proses koalisi tersebut, dimensi yang digunakan adalah dimensi Motivasional. Inti dasar dari dimensi ini adalah suatu koalisi antar partai politik bisa terbentuk atas 2 hal, yaitu atas dasar kedekatan kebijakan (*trade-off*) antara tujuan “*office seeking*” dan komitmen terhadap suatu kebijakan. Misalnya motivasi di antara mitra koalisi atas isu-isu kebijakan, seberapa jauh prioritas isu tersebut dapat berhubungan dengan strategi atau identitas partai. Dalam poin ini koalisi terjadi atas dasar kedekatan kebijakan dan tujuan yang sama antar partai.

Jika di kaitkan dengan masalah karya ilmiah ini, Partai CDU kesulitan berkoalisi dengan partai politik lain seperti Partai SPD. Selain mengumumkan untuk memilih menjadi partai oposisi, Partai SPD juga memiliki hambatan dalam

membangun koalisi dengan fraksi Union. Faktor hambatan ini salah satunya terjadi karena ketidaksepakatan diantara kedua pihak terutama masalah kebijakan ketenagakerjaan yang selama ini di perjuangkan oleh partai SPD sebagai partai politik yang melindungi hak-hak buruh. Selain kebijakan tersebut, kebijakan terkait jaminan kesehatan yang membuat fraksi Union dan Partai SPD kesulitan untuk membentuk pemerintahan bersama.

Kondisi lain juga dialami oleh Partai FDP dan Partai Hijau. Fraksi Union, Partai FDP, dan Partai Hijau juga memiliki hambatan untuk koalisi karena masalah beberapa kebijakan. Hal ini terbukti dalam perundingan awal yang dilakukan pada tanggal 19 November 2017 keempat mitra diskusi (Partai CDU, Partai CSU, Partai FDP dan Partai Hijau) tidak memiliki tujuan yang sama untuk memajukan negara. Selain itu mereka juga tidak mempunyai rasa saling percaya satu sama lain (Akbar, 2017). Kondisi ini yang membuat Partai CDU kesulitan untuk berkoalisi.

Dalam perspektif teori lain oleh Lijphart (1984: 50), ia menganalogikan dalam sebuah garis lurus. Partai politik yang berada pada bagian kiri garis merupakan partai dengan spektrum ideologi kiri. Selanjutnya, partai politik yang berada di sebelah kanan garis merupakan partai dengan spektrum ideologi kanan. Sedangkan partai politik yang berada di tengah garis adalah partai politik dengan spektrum ideologi tengah. Artinya, semakin ke kiri suatu partai politik maka partai tersebut semakin sekuler. Sebaliknya, semakin ke kanan suatu partai maka akan semakin religius.

Salah satu jenis koalisi dari Arend Lijphart dapat menjelaskan dan dianggap relevan dalam permasalahan yang dibahas pada karya tulis ilmiah ini. Salah satu jenis koalisi tersebut adalah *Minimal Connected Coalitions*. Asumsi dasar dari dimensi ini adalah

“The underlying assumption of this theory is that parties will try to coalesce with their immediate neighbors and that other adjacent parties will be added until a majority coalition is formed”

Artinya, partai-partai politik akan berusaha untuk segera bergabung dengan partai-partai politik lain yang berada dalam satu wilayah atau negara dan yang mampu

mendekati partai-partai akan ditambahkan sampai koalisi terbentuk (Lijphart, 1984:50).

Asumsi dasar teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya. Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari partai yang terdekat secara ideologis, yang dengan sendirinya tercermin pada orientasi kebijakan partai. Partai-partai politik tidak sekedar tergabung untuk merebut kekuasaan namun juga mempertimbangkan benar-benar kedekatan terkait dengan kebijakan masing-masing partai (Cipto, 2000:27).

Kondisi yang dialami oleh Partai CDU dan Partai Kiri, kedua pihak tidak memiliki orientasi kedekatan dalam kebijakannya. Sehingga Partai CDU akan sulit untuk membangun koalisi dengan Partai Kiri. Salah satu contoh kebijakan yang memiliki perdebatan dari kedua pihak adalah kebijakan Undang-Undang yang mengesahkan pernikahan sesama jenis yang di dukung oleh Partai Kiri. Sama halnya dengan kondisi yang di alami oleh Partai CDU dan Partai AFD. Partai AFD menolak datangnya pengungsi yang memasuki Jerman dan tidak mengakui adanya agama Islam di Jerman. Dua hal itu merupakan kebijakan partai yang bertolak belakang dengan kebijakan yang di buat oleh Angela Merkel dan Partai CDU. Dengan demikian, akan sulit membentuk koalisi dengan Partai AFD dan Partai Kiri.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama penulis adalah pembentukan pemerintahan baru Jerman pasca pemilu 2017 memiliki faktor penghambat yang membuat Angela Merkel dan Partai CDU kesulitan dalam membentuk koalisi. Faktor penghambat Partai CDU untuk berkoalisi dengan Partai SPD adalah perdebatan terkait masalah kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan jaminan sosial. Selain itu, Partai SPD sempat mengumumkan untuk menjadi partai oposisi pasca pemilu 2017. Sedangkan hambatan yang terjadi antara Partai CDU, Partai Hijau, dan Partai FDP di Jerman cenderung dipengaruhi oleh perbedaan pendapat dan tujuan mengenai

masalah kebijakan energi. Faktor ini membuat perundingan koalisi ketiga partai yang disebut “Koalisi Jamaika” gagal terbentuk.

Selain partai-partai tersebut, kesulitan yang dihadapi oleh Partai CDU dalam berkoalisi dan membentuk pemerintahan baru dengan Partai AfD adalah karena faktor perbedaan kebijakan pengungsi dan menolak adanya agama Islam di Jerman. Kebijakan partai AfD ini merupakan wujud implementasi yang berlandaskan pada platform dan ideologi partai yang nasionalis dan cenderung radikal. Kondisi ini berbeda dengan platform Partai CDU yang liberal dan mendukung agama Islam sebagai agama nasional, serta menjamin hak-hak pengungsi di Jerman. Perbedaan platform dan ideologi partai sangat menentukan tingkah laku partai dalam berkoalisi. Seperti Partai CDU yang sosial demokrasi dengan Partai *Die Linke* yang anti-neoliberal dan anti-kapitalisme. Nilai-nilai yang dianut oleh berbagai partai di Jerman akan berimbas pada perbedaan kepentingan yang kemudian akan diimplikasikan melalui beberapa kebijakan. Adanya perdebatan Partai CDU dan Partai Kiri terkait masalah Undang-Undang pernikahan sejenis membuat Partai CDU cenderung tidak membangun koalisi dengan partai ini.

1.7 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011: 2), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan untuk kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Selain itu, metode penelitian adalah langkah bagi penulis dalam mengolah data penelitian. Metode penelitian sangat penting dalam karya ilmiah karena hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan pemilihan metode penelitian. Metode penelitian yang tepat dan ilmiah akan membuat penelitian tersebut benar dan diakui. Oleh karena itu dalam bab metode penelitian ini peneliti akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan metode-metode penelitian, antara lain:

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara penulis mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini. Selain itu untuk mengkaji kebenaran ilmiah suatu objek penelitian, peneliti harus memiliki data yang menguatkan argumentasi yang akan dipaparkannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur yang menggunakan data sekunder sebagai sumber kajian. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi lapangan secara langsung, akan tetapi cukup merujuk pada informasi yang sudah ada dari hasil penelitian lain yang dianggap paling relevan terhadap isu atau fenomena yang akan dianalisa. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat penulis dari analisa hasil penelitian pihak lain, berita, jurnal, artikel, laporan berkala, dan buku. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka ini dilaksanakan di beberapa tempat yang relevan, yaitu:

1. Perpustakaan pusat Universitas Jember,
2. Ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember

1.7.2 Metode Analisa Data

Metode analisis data adalah cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data-data yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan demikian, adanya analisis data ini dapat digunakan penulis untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta menginterpretasikan sebuah fenomena dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan.

1.8 Sistematika Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini terbagi menjadi lima bab, di antaranya:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang dari Partai CDU di Jerman yang memiliki hambatan untuk berkoalisi dengan partai lain. Kemudian dalam bab ini juga dijelaskan beberapa poin penting mengenai penulisan penelitian karya ilmiah ini. Mulai dari ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian.

Bab 2 Peta Kepartaian di Jerman

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana ciri-ciri partai di Jerman. Mulai dari sistem ideologi yang dianut, tujuan dan kepentingan-kepentingan partai. Kemudian akan muncul perbedaan-perbedaan yang menjadi faktor sulitnya Partai CDU untuk berkoalisi.

Bab 3 Pemilihan Umum Jerman Tahun 2017

Dalam bab ini penulis menjelaskan proses pemilu Jerman yang diadakan pada bulan September 2017. Selain itu, menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi Partai CDU dan Angela Merkel pasca pemilu. Penulis juga menjelaskan komposisi perolehan suara dalam pemilu yang akhirnya membuat Partai CDU harus melakukan koalisi dengan partai lain.

Bab 4 Hambatan dalam Membentuk Pemerintahan Baru Jerman

Penulis menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab partai CDU di Jerman kesulitan berkoalisi. Kemudian hal itu dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan Angela Merkel sebelumnya. Kebijakan yang dimaksud dalam karya ilmiah ini dibatasi pada kebijakan yang membuat partai-partai lain menentang dan menimbulkan pro-kontra. Dengan demikian, memunculkan hambatan Partai CDU untuk berkoalisi.

Bab 5 Penutup

Bab ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang berisi tentang kesimpulan mengenai hambatan-hambatan partai CDU untuk berkoalisi dengan partai lain di Jerman. Selain itu, terdapat saran dari penulis tentang isu yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini.



BAB 2. PETA KEPARTAIAN DI JERMAN

Sama halnya dengan negara-negara di benua Eropa, Jerman merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi liberal. Negara Jerman yang memiliki nama resmi *Bundesrepublik Deutschland* atau *Federal Republic of Germany* menganut sistem demokrasi parlementer dengan Kanselir sebagai kepala pemerintahan dan jabatan Presiden sebagai kepala negara. Negara Jerman pasca Perang Dunia II menggunakan *Basic Law (Grundgesetz)* 1949 sebagai konstitusi atau peraturan yang mengatur sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan. Konstitusi tersebut mengutamakan perlindungan kebebasan individual dan pembagian kekuasaan di tingkat negara bagian dan federal.

Berikut ini adalah gambar dari 16 negara bagian di Jerman



Gambar 2.1 Peta Wilayah 16 Negara Bagian Jerman

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>.
Diakses pada tanggal 21 Januari 2018)

Sebagai negara federasi, wilayah Jerman terdiri dari enam belas negara bagian, diantaranya negara bagian Bayern (Bavaria), Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen (Lower Saxony), Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia), Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate), Hessen (Hesse), Saarland, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen (Saxony), Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt), dan Thüringen (Thuringia). Negara Bagian Berlin, Bremen, dan Hamburg sering disebut Negara Kota (*Stadtstaaten*) dan Negara Bagian lainnya disebut *Flächenländer* karena memiliki wilayah yang lebih luas.

Selain itu, Jerman juga merupakan salah satu negara yang menganut sistem multipartai. Definisinya, sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum, dan semua partai politik memiliki hak untuk memegang kekuasaan dalam pemerintahan, baik secara terpisah ataupun dalam koalisi. Terdapat 6 Partai politik utama di Jerman, yaitu *Christlich Demokratische Union (CDU)*, *Christlich Soziale Union (CSU)*, *Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)*, Partai Hijau yang berfokus pada isu-isu lingkungan, *Die Linke* yang berhaluan radikal kiri, dan *Freie Demokratische Partei (FDP)*. Sistem demokrasi parlementer dengan multipartai di Jerman memberikan suatu kesempatan bagi berdirinya partai-partai politik dengan beragam ideologi yang dianut.

Namun demikian, pasca pemilihan umum tahun 2017, kemunculan Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) dalam pemerintahan Jerman menimbulkan kekhawatiran Partai-Partai lain, terutama kenselir Angela Merkel. Hal ini mengingat ideologi Partai AfD dan Partai CDU yang berbeda. Setiap Partai mempunyai profil berbeda. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjelaskan hambatan Partai CDU dalam berkoalisi. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis mendeskripsikan dan menjelaskan keenam Partai utama di Jerman yang menjadi objek penelitian karya ilmiah ini.

2.1 *Christlich Demokratische Union (CDU)*

Christlich Demokratische Union (CDU) adalah partai politik Kristen di Jerman yang menganut demokrasi dan konservatif liberal. Partai CDU merupakan partai aliran tengah-kanan dalam perpolitikan Jerman. Partai Persatuan Sosial Kristen di Bayern (CSU), dan partai CDU membentuk koalisi CDU-CSU (biasa disebut Union) di *Bundestag*. Ketua Partai CDU saat ini menjabat sebagai kanselir Jerman, Angela Merkel. Sedangkan pemimpin parlemen dari Partai ini di pimpin oleh Volker Kauder. Ideologi Partai CDU cenderung konservatif liberal dan kristen demokrasi. Selain itu warna hitam menjadi warna wajib di dalam Partai.



Gambar 2.2 Logo Partai *Christlich Demokratische Union (CDU)*

(Sumber: Bischoff, Matthias, Eric Chauvistré. 2015. *Tatsachen über Deutschland*. Berlin: Frankfurter Societäts-Medien GmbH. Halaman: 14)

Dalam sejarahnya, Partai ini di resmikan oleh Andreas Hermes dan Konrad Adenauer. Selain itu, Partai CDU adalah sarana penyatuan kembali warga Jerman yang beragama Kristen. Partai yang didirikan di wilayah Jerman Barat pada 1950 ini menjadi kekuatan politik dominan di Jerman Barat setelah Perang Dunia II, dan setelah penyatuan kembali wilayah Jerman. Partai CDU dan partai CSU (fraksi Union) telah memimpin pemerintahan selama 47 tahun.

Kanselir dari Partai CDU, Konrad Adenauer yang memerintah dari tahun 1949 hingga tahun 1963 disebut sebagai pendiri Jerman barat bersama Ludwig Erhard yang membangun kembali perekonomian Jerman setelah Perang Dunia II. Helmut Kohl yang lama berkuasa dan mendorong penyatuan kembali Jerman tahun 1990 juga berasal dari Partai ini. Rakyat percaya ia bersama Menteri Keuangan Wolfgang Schäuble mampu menjaga keamanan ekonomi. Ia juga menentang pernikahan homoseksual. Namun demikian, pandangannya yang liberal tentang imigrasi ditentang banyak orang di “tubuh” Partai CDU. Dalam

pilihannya menjalin koalisi dengan Partai lain, Partai CDU cenderung berkoalisi dengan Partai *Sozialdemokratische Partei Deutschlands* (SPD), Partai *Freie Demokratische Party* (FDP), dan Partai Hijau (*Bündnis 90/Die Grünen*).

Keanggotaan Partai CDU pada tahun 2015 mencapai 457.488 anggota di seluruh wilayah Jerman (Bischoff, 2015). Usia rata-rata anggota sekitar 59 dan diatas 60 tahun. 6% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dalam perkembangan keanggotaan, pendukung Partai ini tersebar diseluruh negara bagian Jerman. Namun demikian, sebagian besar pendukungnya menetap di pedesaan dan daerah-daerah Katolik seperti Eisfeld (Thuringen), Münsterland (Nordrhein-Westfalen), Saalfeld (Thuringen), distrik Fulda (Hessen), Emsland (Nordrhein-Westfalen), Oldenburger Münsterland (Nordrhein-Westfalen), Thuringia Eichsfeld (Thuringen) serta Nordfriesland (Niedersachsen), Sachsen, Schwaben (Bavaria), Vorpommern (Hessen), Saarland Utara, Taunus (Hessen), dan kota-kota kecil seperti Baden-Baden (Baden-Württemberg), Konstanz (Baden-Württemberg), dan Pforzheim (Baden-Württemberg). Ada pula dukungan kecil di Bremen, Brandenburg, dan Berlin Timur. Selain itu, anggota sebagian besar merupakan jemaat gereja, pemilik usaha kecil dan orang dengan tingkat pendidikan rendah dan menengah.

Pendukung yang dimiliki Partai CDU dan tersebar di beberapa wilayah Jerman, kondisi ini juga tidak terlepas dari figur ketua Partai CDU yang kemudian menjabat sebagai kanselir Jerman. Berikut adalah nama-nama kanselir dari Partai CDU dalam beberapa periode, yaitu Konrad Adenauer (1949-1963), Ludwig Erhard (1963-1966), Kurt Georg Kiesinger (1966-1969), Helmut Kohl (1982-1998), dan Angela Merkel (2005-saat ini).

2.2 *Christlich Soziale Union (CSU)*

Partai CSU adalah partai politik konservatif di Jerman. Partai ini dipimpin oleh Horst Seehofer dan hanya beroperasi di negara bagian Bayern (Bavaria). Partai ini didirikan pada 1945, partai CSU telah menjadi partai penguasa di pemerintah negara bagian Bayern sebagai partai lokal. Dalam perpolitikan Jerman, koalisi permanen Partai CDU-CSU biasa disebut sebagai "Die Union" dan diasosiasikan oleh media massa dengan warna hitam (*schwarz*).

Pada dasarnya Partai CSU lebih konservatif secara sosial terutama dalam masalah keluarga seperti pembayaran uang cuti kelahiran. Partai CSU sendiri telah menciptakan suatu undang-undang terkait dengan waktu belanja untuk melindungi pekerja di sektor ritel. Partai ini juga menentang ide program jaminan kesehatan sebagai pemasukan atau penghasilan tetap yang banyak disetujui oleh anggota parlemen dari Partai CDU pada tahun 2010. Partai CSU sering menganggap diri mereka sebagai penjaga hak-hak dari negara bagian Bayern atau Bavaria dan kemerdekaan budaya dari birokrat-birokrat Uni Eropa.



Gambar 2.3 Logo Partai *Christlich Soziale Union* (CSU)

(Sumber: Bischoff, Matthias, Eric Chauvistré. 2015. *Tatsachen über Deutschland*. Berlin: Frankfurter Societäts-Medien GmbH. Halaman: 14)

Selain itu, Partai CSU memiliki kecenderungan untuk berada pada posisi yang lebih kanan bila dibandingkan dengan Partai CDU. Misalnya, dalam isu masuknya imigran ke Jerman, Partai CSU ingin membatasi jumlah imigran yang masuk menjadi 200.000 orang, namun Partai CDU menginginkan jumlah yang lebih meskipun tetap menginginkan adanya pembatasan jumlah imigran yang masuk. Sementara pada 2015, anggota Partai ini yang telah terdaftar sebanyak 146.536 anggota (Bischoff, 2015: 14).

2.3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Partai Demokrat Sosial Jerman adalah partai politik yang paling lama didirikan di negara Jerman. Partai ini didirikan oleh Karl Kautsky, Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht pada tahun 1875. Partai ini memiliki ideologi berdasarkan pemikiran dasar Karl Marx. Setelah Perang Dunia II, Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) mengubah dasar ideologinya menjadi partai yang mewakili kepentingan kelas pekerja dan serikat pekerja atau buruh dan secara bertahap berkembang dari sosialis kelas pekerja menjadi sosialis demokrasi. Kemudian Partai ini lebih memfokuskan terhadap gerakan-gerakan Jerman yang berhaluan kiri, serikat pekerja dan kaum komunis.

Kanselir pertama SPD, Willy Brandt, memerintah Jerman Barat dari tahun 1969 hingga tahun 1974. Ia memperoleh reputasi internasional untuk rekonsiliasi dengan Eropa Timur selama masa jabatannya sebagai menteri luar negeri dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin Partai CDU. Ia digantikan oleh Helmut Schmidt dari Partai SPD hingga pada tahun 2015. Keduanya tetap merupakan figur yang sangat dihormati dalam politik Jerman. Secara keseluruhan, Partai SPD telah menjadi bagian dari pemerintah Jerman selama 34 dari 67 tahun Republik Federal. Meskipun jangkauan Partai ini telah berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun Partai SPD tetap mempertahankan fokus kebijakannya terkait masalah buruh dan pengungsi. Hal itu karena beberapa kebijakan reformasi sosial Angela Merkel yang paling signifikan selama pemerintahan ketiganya.

Martin Schulz dinobatkan menjadi ketua umum Partai SPD, yang memiliki anggota sekitar 459.902 (Bischoff, 2015). Pemimpin parlemen dari Partai SPD dijabat oleh Andrea Nahles. Secara tradisional Partai SPD merupakan Partai buruh, pekerja dan serikat pekerja di Jerman. Maka dari itu partai ini mendapat dukungan terbanyak di kawasan-kawasan industri yang padat penduduk di Jerman Barat, terutama di daerah Ruhr, di negara bagian Nordrhein Westfalen, Hessen dan Niedersachsen.



Gambar 2.4 Logo Partai *Sozialdemokratische Partei Deutschlands* (SPD)

(Sumber: Bischoff, Matthias, Eric Chauvistré. 2015. *Tatsachen über Deutschland*. Berlin: Frankfurter Societäts-Medien GmbH. Halaman: 14)

Kebijakan utama Partai SPD adalah politik sosial. Partai ini mengutamakan infrastruktur sosial yang kuat, tetapi mendukung pembatasan tunjangan pengangguran. Pada 2015, Partai SPD berperan penting dan menjadi pendorong utama penetapan gaji minimum di Jerman. Sekarang besarnya 8,84 Euro per jam. Kini Ketua umum Partai SPD, Martin Schulz menekankan keadilan sosial dan koreksi distribusi pajak. Namun demikian, Agenda 2010 reformasi pasar tenaga kerja yang diperkenalkan oleh Partai SPD melalui Kanselir Gerhard Schröder pada awal tahun 2000 telah kehilangan dukungan beberapa Partai tradisional, dan hal ini berimbas pada pencalonan Martin Schulz yang akhirnya ditandai dengan "koreksi" kebijakan, dan penekanan baru pada keadilan sosial dan redistribusi pajak. Selain itu, dalam mencapai tujuan Partainya, SPD cenderung melakukan koalisi dengan Partai *Christlich Demokratische Union* (CDU) dan Partai Hijau.

2.4 Partai Kiri (*Die Linke*)

Die Linke adalah salah satu Partai Jerman yang dibentuk pada tahun 2007. Partai Kiri ini mempunyai sejarah yang panjang dan merupakan pecahan Partai Sosialis (SED) yang sempat berkuasa di Jerman Timur hingga reunifikasi dengan Barat pada tahun 1990. Partai *Die Linke* adalah satu-satunya Partai yang menolak misi militer Jerman di luar negeri. Partai ini juga mengusulkan adanya upah minimum yang dinaikkan dari kurs 8,84 euro menjadi 12 euro (\$ 14,10). Sejumlah masyarakat Jerman masih menilai Partai *Die Linke* sebagai Partai yang radikal dan selalu berusaha menggulingkan perekonomian yang berdasarkan pada

kapitalisme. Namun demikian, partai ini sebenarnya hanya menginginkan regulasi pasar yang lebih ketat dan investasi yang lebih luas di bidang sosial.

Partai Kiri dibentuk dari penggabungan penerus SED, Partai Sosialisme Demokratis (PDS), Keadilan Sosial dan Tenaga Kerja (WASG), dan gerakan serikat pekerja Jerman Barat dan anggota SPD yang tidak puas dan merasa diasingkan oleh pemotongan kesejahteraan yang diperkenalkan oleh Gerhard Schröder. Menteri keuangan dan mantan ketua SPD, Oskar Lafontaine, kemudian memimpin Partai Kiri dan masih merupakan tokoh penting yang memandu Partai ini. Karena hubungannya dengan kediktatoran Jerman Timur, Partai Kiri cenderung menjadi partai yang tidak pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintah federal, meskipun ia memiliki beberapa pengalaman pemerintah di tingkat negara bagian.

Perjalanan partai PDS yang tidak sesuai rencana, begitu pula kekecewaan WASG kepada PSD (Partai Sosial Demokrat) merupakan sejarah yang kemudian anggotanya mendirikan partai *Die Linke*. Pada pemilu tahun 1990 setelah penyatuan kembali negara Jerman, partai PDS hanya mendapatkan suara 2,4 %, begitupula pada pemilu selanjutnya di tahun 1994. Setelah 4 tahun partai PDS meraih 5,1 % suara di parlemen. Namun setelah 4 tahun setelahnya, mereka terpaksa keluar dari parlemen karena perolehan suara yang turun hingga 4%. Hal ini membuat PDS mengambil suatu kebijakan untuk melonggarkan platform lama partai yang berhaluan Marxist Leninis menjadi Partai yang lebih terbuka untuk isu-isu seperti demokrasi, militerisme, pendidikan dan kebijakan ekonomi.

Singkatnya, dalam sejarah partai *Die Linke* berawal ketika Kanselir Jerman Gerhard Schroder, seorang anggota dari partai SPD yang berhaluan sosial demokrat, meluncurkan paket Legislasi 2010 pada tahun 2003. Paket ini berisi program yang membahas untuk mengubah pengamanan sosial, pengurangan subsidi, privatisasi, serta menghilangkan subsidi pendidikan tinggi yang selama ini gratis di Jerman. Kemudian pada tahun itu juga, 100.000 orang turun ke jalan untuk menolak Agenda tersebut. Demonstrasi ini dilakukan oleh kaum buruh, mahasiswa, kelompok sayap kiri dan kaum pengangguran di Jerman. Akibatnya, anggota internal partai SPD mulai goyah. Dukungan yang kuat dari kelompok

buruh pun terpecah. Kemudian Oskar Lafontaine, salah satu pemimpin Partai SPD yang juga merupakan mantan menteri keuangan federal pada tahun 1999, mengundurkan diri dari Partai SPD dan kemudian membentuk Partai WASG. Sejak pengunduran dirinya, Partai SPD kehilangan 200.000 pendukung di tahun 2004.

Melalui diskusi tahun 2005, pasca kekalahan partai WASG dan PDS di North Rhine-Westphalia pada pemilu negara bagian itu, maka menjelang pemilu federal 2005, Partai PDS dan WASG menyepakati untuk membangun koalisi. Uniknya, sebanyak 54 kursi di *Bundestag* diraih oleh koalisi yang pertama kali mereka bentuk. Aliansi ini kembali membawa hasil yang cukup memuaskan ketika pada pemilu di wilayah negara bagian Bremen, mereka mendapatkan suara hingga 13%, capaian itu ternyata melampaui perolehan partai FDP (Partai Liberal) dan partai *Die Grune* (Partai Hijau). Kemudian, kemenangan ini yang membawa Partai PDS dan WASG mengukuhkan aliansinya dengan nama partai politik yang baru, yaitu partai *Die Linke* pada bulan Juni 2007.



Gambar 2.5 Logo Partai Kiri (*Die Linke*)

(Sumber: Bischoff, Matthias, Eric Chauvistré. 2015. *Tatsachen über Deutschland*. Berlin: Frankfurter Societäts-Medien GmbH. Halaman: 14)

Negara Jerman sendiri, kembalinya partai *Die Linke* dalam perpolitikan negara Jerman merupakan fenomena tersendiri. Banyak masyarakat yang menyebut *Die Linke* sebagai partai berhaluan libertarian sosialis, sementara sebagian yang lain menyebutnya sebagai kaum sosial demokrat. Namun platform sosial demokrat telah diklaim oleh Partai SPD, dengan program utama *Social Democracy* dan *Social Economy Market*. Menariknya, penampilan Partai SPD di *Bundestag* justru semakin mengarah kepada kompromi terhadap sistem ekonomi

pasar liberal dan demokrasi liberal. Kondisi ini yang kemudian dipakai oleh partai *Die Linke* untuk maju mempromosikan demokratik sosialisme, platform anti kapitalisme, anti privatisasi dan pendidikan gratis serta menaikkan pajak penghasilan untuk orang-orang kaya Jerman.

Ketua Partai *Die Linke* saat ini adalah Katja Kipping dan Bernd Riexinger. Jumlah masyarakat Jerman yang menjadi anggota Partai ini sekitar 60.547 anggota (Bischoff, 2015: 15). Pendukung partai ini paling banyak tinggal di kawasan yang dulu menjadi wilayah Jerman Timur. Partai *Die Linke* ikut memerintah di tingkat negara bagian di kawasan tersebut. Sebagian besar pendukungnya cenderung mantan komunis atau berpandangan komunis dan berusia lanjut. Pemilihnya adalah mantan pendukung Partai *Republik Demokratik Jerman (GDR)* yang telah bubar. Sedangkan pendukung yang tinggal di bagian barat kebanyakan berusia lebih muda dan mendukung partai ini sebagai bentuk protes terhadap Partai CDU dan Partai SPD. Selain itu, banyak dari mereka juga beralih ke Partai nasionalis dan populis AfD dalam dua tahun terakhir. Mitra koalisi Partai ini cenderung memilih Partai *Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)* dan Partai Hijau.

Selain itu, fokus utama partai *Die Linke* adalah kaum buruh dan pemuda serta masyarakat miskin. Kaum buruh negara Jerman banyak yang memilih pada posisi independen. Hal ini disebabkan karena partai-partai politik yang ada di Jerman memiliki keberagaman ideologi, namun memiliki kemiripan pada program politiknya. Perpindahan suara kaum buruh yang dulunya mendukung Partai CDU ke partai SPD, kini mulai mengalami sedikit perubahan. Setelah kurang puas dengan kebijakan Partai SPD, mereka kemudian beralih mendukung partai *Die Linke* sebagai partai alternatif. Begitu juga dengan kelompok perempuan yang tadinya mendukung partai *Die Grune* (Partai hijau), kini mereka mulai memilih partai *Die Linke* dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

Salah satu hambatan terbesar Partai *Die Linke* adalah platform partainya yang terlalu radikal. Ketakutan warga Jerman akan kembalinya ultranasionalisme merupakan isu yang bisa saja membuat *Die Linke* “jatuh” di masa yang akan datang. Setidaknya, pengalaman partai PDS yang mengajarkan Partai *Die Linke*

untuk lebih berhati-hati agar selalu berhasil mencapai batas minimum pada sistem pemilu Jerman.

2.5 Partai Hijau (*The Greens - Die Grünen*)

Cem Özdemir dan Simone Peter adalah ketua umum Partai Hijau Jerman yang memiliki keanggotaan sekitar 60.329 anggota (Bischoff, 2015: 14). Sedangkan pemimpin dalam parlemen dari Partai ini di pimpin oleh Katrin Göring-Eckardt, dan Anton Hofreiter. Sebagian besar pendukung Partai Hijau adalah warga Jerman yang berpendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan. Pendukung Partai ini sangat bergantung pada demografi perkotaan terdidik. Wilayahnya berada di kota-kota di Jerman Barat, terutama di daerah yang terdapat universitas. Namun demikian, demografi pendukung partai ini semakin mengalami perubahan pada beberapa tahun belakangan. Pendukung dari kelompok usia lebih tua bertambah, juga dari segi pendapatan. Selain itu, Partai Hijau juga berusaha “merangkul” kaum pekerja dan pemilih dari kelas berpendapatan rendah di Jerman. Kurang dari 10% pemilih Partai Hijau saat ini dibawah 35 tahun.

Dalam sejarah Partai, Partai yang memiliki nama resmi *Bündnis 90/Die Grünen* (Aliansi '90/Partai Hijau) berakar pada gerakan protes sosial yang timbul di tahun 1980. Sekitar 100 utusan dari kelompok-kelompok gerakan peduli lingkungan mengadakan konferensi di Karlsruhe Jerman Barat, yang kemudian mereka memutuskan untuk membentuk partai politik baru sebagai sarana untuk memperjuangkan perlindungan terhadap isu-isu lingkungan (Capra and Spretnak, 1984). Berbagai kelompok tersebut memperjuangkan berbagai hal, mulai dari penghentian tenaga nuklir di Jerman, hingga hak-hak homoseksual, dan fokus utama mereka terkait proteksi lingkungan. Semua hal yang mereka perjuangkan ini sudah menjadi agenda permanen dalam diskusi politik umum di Jerman.

Gerakan-gerakan sosial yang berkembang di tahun 1970-an merupakan sejarah awal terbentuknya Partai Hijau di Jerman. Gerakan-gerakan ini berbasis pada isu-isu perdamaian, anti nuklir, lingkungan, dan dukungannya terhadap gerakan feminis. Dalam perkembangannya di lingkup global, gerakan ini

kemudian berubah bentuk menjadi partai politik. Isu perjuangan yang mereka bawa masih sama, namun menyesuaikan dengan perkembangan politik yang terjadi di negara Jerman. Penyesuaian isu tersebut pada dasarnya tidak merubah visi misi isu perjuangan awal. Salah satu tujuan gerakan sosial yang kemudian berubah menjadi partai politik adalah untuk meningkatkan pengaruhnya pada tingkat politik dalam negeri maupun luar negeri yang kemudian akan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berkuasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Partai Hijau Jerman memiliki maksud untuk memanfaatkan sarana politik untuk mencapai tujuan perjuangan yang mereka bawa.



Gambar 2.6 Logo Partai Hijau (*The Greens - Die Grünen*)

(Sumber: Bischoff, Matthias, Eric Chauvistré. 2015. *Tatsachen über Deutschland*. Berlin: Frankfurter Societäts-Medien GmbH. Halaman: 14)

Secara perlahan Partai Hijau berhasil membawa pengaruhnya dalam sistem kepartaian Jerman. Keunikan isu yang mereka bawa memberi nilai tambah partai ini dalam sistem politik karena memfokuskan pada isu lingkungan yang tidak pernah disentuh oleh partai politik sebelumnya. Oleh karena itu hadirnya Partai Hijau yang mengusung perjuangan terhadap isu-isu lingkungan mendapat respon yang baik dari masyarakat Jerman. Kemudian sejak saat itu "green issues" menjadi suatu masalah yang serius dan selalu menghasilkan banyak perhatian masyarakat dan pemerintah negara Jerman.

Selain itu masyarakat Jerman biasanya membedakan para pendukung Partai Hijau dalam dua kelompok, yaitu: "*Realos*" (mereka yang bersedia berkompromi agar bisa ikut memerintah), dan "*Fundis*" (kaum fundamentalis, lebih bersifat sosialis dan bersifat perlawanan terhadap pemerintah). Namun, dalam perkembangannya, kaum *Realos* semakin menguasai internal Partai Hijau,

sehingga Partai Hijau bisa berkoalisi dengan Partai CDU di negara bagian. Perjuangan mereka tetap pada isu perlindungan dan pelestarian lingkungan. Tetapi mereka juga cenderung mendukung kebijakan pajak dan sosial kepada paham sosialis. Hal ini membuat Partai Hijau di Jerman merupakan partai politik alternatif dan cenderung berhaluan sosialis demokrat.

2.6 Partai Liberal Jerman (*Freie Demokratische Partei* atau FDP)

Partai FDP yang dipimpin oleh Christian Lindner merupakan Partai yang menyokong pengusaha independen. Anggota Partai ini mencapai sekitar 63.000. Sebagai Partai perusahaan bebas neo-liberal, tidak mengherankan bahwa Partai FDP telah menemukan pemilih terbanyak di antara wiraswasta. Sebagai partai yang mendukung pengusaha independen, maka Partai FDP lebih banyak didukung oleh para pemilik bisnis, masyarakat yang berprofesi sebagai dokter gigi dan juga pengacara. Sementara dari kalangan pekerja atau kaum buruh cenderung sedikit yang mendukung partai politik ini.

Dalam sejarahnya Partai ini selalu terwakili dalam *Bundestag* Jerman, namun gagal melewati batas 5% pada pemilihan umum tahun 2013. Sejak kekalahannya saat itu, partai FDP ini kemudian berjuang untuk kembali masuk dalam parlemen dan perpolitikan Jerman. Partai yang didirikan pada bulan Desember 1948 ini sering membangun koalisi dalam pemerintahan, walaupun pihaknya selalu menjadi mitra junior. Program Partai FDP didasari pada prinsip kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Selain itu partai ini merupakan partai pendukung setia Uni Eropa. Ia bahkan menuntut kerjasama yang lebih erat lagi dengan berbagai pihak dalam kerangka Uni Eropa.

Partai Liberal Demokrat adalah Partai tetap di parlemen Jerman sejak masa awal Republik Federal. Namun demikian, karena kegagalan melampaui ambang batas 5% tersebut, maka Partai ini menderita kerugian pemilihan yang besar pada 2013. Kemudian Partai FDP kembali berjuang untuk relevansi sejak itu, dan kemudian mengalami kebangkitan di bawah pemimpin baru Christian Lindner, dan sekarang kembali memasuki parlemen. Partai yang didirikan pada bulan Desember 1948, Partai FDP telah menjadi “*kingmaker*” untuk Partai CDU

dan Partai SPD pada masanya. Meskipun tidak pernah memimpin pemerintahan Jerman, ia berpartisipasi dalam pemerintahan selama 41 tahun, lebih lama dari Partai lainnya.



Gambar 2.7 Logo Partai Liberal Jerman (*Freie Demokratische Partei* atau FDP)

(Sumber: Bischoff, Matthias, Eric Chauvistré. 2015. *Tatsachen über Deutschland*. Berlin: Frankfurter Societäts-Medien GmbH. Halaman: 14)

Program partai FDP didirikan pada prinsip-prinsip kebebasan individu dan hak-hak bagi masyarakat sipil. Sementara itu, Partai FDP juga selalu berkampanye untuk pemotongan pajak lebih banyak, hal itu untuk menentang dan meninggalkan pasar keuangan yang tak terkendali. Partai FDP ini juga merupakan salah satu Partai yang pro-Eropa. Dalam pilihan mitra koalisi, biasanya Partai ini cenderung berkoalisi dengan Partai CDU.

2.7 Partai *Alternative für Deutschland* (AfD)

Partai yang dipimpin oleh Jörg Meuthen ini telah memiliki anggota sekitar 25.000 jiwa. Sedangkan Alexander Gauland dan Alice Weidel memimpin Partai ini di tingkat parlemen. Mayoritas pendukung Partai AfD berasal dari ketidakpuasan warga negara Jerman yang sebelumnya lebih memilih partai-partai besar, seperti partai CDU dan partai SPD. Partai AfD juga dapat menggerakkan masyarakat yang bukan pendukungnya (memobilisasi banyak non-pemilih). Partai ini disokong oleh warga Jerman yang berpendapatan rendah dan berpendidikan rendah. Selain itu, partai ini di dukung oleh warga Jerman yang terpinggirkan dan menginginkan perubahan, pekerja dan akademisi terutama di kawasan Jerman bagian Timur. Keanggotaannya memiliki satu fitur penting, yaitu hanya 15% pemilih adalah wanita.

Alternatif nasionalis sayap kanan untuk Jerman (AfD) telah menjadi terkenal dalam empat tahun keberadaannya. Partai AfD yang berhaluan nasionalis didirikan pada 5 bulan menjelang pemilu 2013. Pada awal terbentuknya, partai ini hampir berhasil memasuki kursi *Bundestag*. Perolehan suara yang didapatkan pada waktu itu hanya selisih sedikit dari ambang batas 5%. Sejak saat itu, partai AfD semakin memperoleh hasil yang baik dalam pemilu tingkat negara bagian di Jerman. Partai nasionalis, anti imigran dan anti-Islam ini menggalang pendukung di masa krisis pengungsi tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016, Partai AfD adalah satu-satunya partai Jerman yang menyambut baik keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.



Gambar 2.8 Logo Partai *Alternative für Deutschland* (AfD)

(Sumber: Bischoff, Matthias, Eric Chauvistré. 2015. *Tatsachen über Deutschland*. Berlin: Frankfurter Societäts-Medien GmbH. Halaman: 14)

Partai AfD awalnya diciptakan oleh sekelompok akademisi neo-liberal sebagai protes terhadap mata uang tunggal Eropa. Mereka marah secara khusus dengan keputusan Angela Merkel untuk menyelamatkan Yunani pada tahun 2010 dan menyusul krisis keuangan Eropa. Namun demikian, perebutan kekuasaan pada tahun 2015 berakhir dengan pemecatan pemimpin Partai Bernd Lucke, yang digantikan oleh Frauke Petry. Frauke Petry, bersama dengan tokoh-tokoh terkemuka lainnya, mengatur agenda nasionalis, anti-imigran, anti-Islam yang jauh lebih terang-terangan, sebuah kebijakan yang mencetak beberapa keberhasilan selama krisis pengungsi tahun 2015. Meskipun, Frauke Petry kini juga meninggalkan partai itu, sebagai bentuk protes terhadap partai menjelang pemilihan umum tahun 2017.

Partai ini berniat menutup perbatasan Uni Eropa, mengadakan pemeriksaan identitas yang ketat di perbatasan Jerman dan mendirikan kamp-kamp di luar negeri untuk mencegah imigran yang masuk ke Jerman. Partai ini juga menginginkan untuk segera mendeportasi dan menolak siapa saja yang mengajukan permohonan suaka politiknya, dan mendorong orang asing untuk kembali ke negara asal mereka. Partai AfD juga menjaga pentingnya kebudayaan tradisional Jerman dan menolak agama Islam sebagai agama yang merupakan bagian dari negara Jerman. Partai ini juga menganggap bahwa perubahan iklim adalah dampak dari perbuatan manusia. Selain itu, mereka juga ingin menghentikan transisi yang berlangsung di Jerman menuju sumber energi yang terbarukan. Pada dasarnya penyebab partai ini terbentuk karena masalah ekonomi yang terjadi di Jerman dan masalah krisis pengungsi. Dengan demikian, partai ini merupakan bentuk kekecewaan warga Jerman terhadap elite politik terutama kepada Partai CDU.

Dari penjelasan diatas, maka Partai *Christian Social Union* (CSU) merupakan Partai lokal dan hanya berada di negara bagian *Bayern*. Sedangkan Partai *Christlich Demokratische Union* (CDU), *Sozialdemokratische Partei Deutschland* (SPD), Partai Hijau (*Die Grünen* atau *The Greens*), *Die Linke* atau *The Left Party* (Partai Kiri) , dan *Freie Demokratische Partei* (FDP) merupakan Partai nasional negara Jerman. Karena memiliki ideologi yang cenderung sama maka partai CDU dan partai CSU bekerja sama secara permanen di tingkat federal dan kemudian membentuk fraksi bersama di parlemen. Antara partai-partai diatas, Partai SPD dan Partai CDU merupakan dua partai besar yang mendominasi politik Jerman serta menguasai pemerintahan federal secara bergantian sejak *Basic Law* diterapkan tahun 1949.

Platform partai politik Jerman yang berbeda, membuat Partai politik tidak leluasa untuk menentukan *partner* koalisinya. Mereka tetap membutuhkan musyawarah yang diadakan dalam internal Partai dan berbagi pertimbangan agar tidak berdampak pada jumlah pendukung Partai dalam tahun-tahun berikutnya. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk mengejar kekuasaan dalam memimpin

Jerman. Namun demikian juga untuk mempertahankan performa Partai yang semakin baik. Harapannya dalam pemilu berikutnya, jumlah konstituen dan pendukung Partai tetap stabil bahkan meningkat. Performa Partai yang baik akan berdampak pada jumlah konstituen dalam pemilu. Kemudian jumlah pendukung yang tersebar di seluruh negara bagian Jerman, akan berdampak pada masuknya Partai politik dalam *Bundestag*. Mengingat aturan pemilu di Jerman yang memberlakukan adanya pembatas atau capaian minimum Partai politik yang dapat memasuki *Bundestag*. Lebih jelasnya, penulis menjelaskan aturan pemilihan umum Jerman pada bab berikutnya.



BAB 3. PEMILIHAN UMUM JERMAN 2017

3.1 Sistem Pemilihan Umum Jerman

Seperti negara-negara lainnya, pemerintahan Jerman dibagi menjadi 3 lembaga yaitu lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Jerman merupakan negara federal yang terdiri dari 16 *Lander* yang menganut sistem bikameral. Dalam sistem bikameral Jerman, sistem ini terbagi menjadi *Bundestag* dan *Bundesrat*. Menurut pengertiannya, *Bundestag* adalah parlemen tingkat federal yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu.

Ciri-ciri negara Jerman sebagai negara federal adalah adanya 16 negara bagian yang masing-masing bagiannya sangat mandiri, terutama dalam masalah penanggulangan bencana alam, pendidikan, dan kebudayaan. Sarana utama dalam partisipasi masyarakat Jerman terletak pada jabatan *Bundesrat*. *Bundesrat* adalah Senat yang anggotanya berfungsi memperjuangkan kepentingan dari masing-masing negara-negara bagian. Anggota *Bundesrat* berasal dari wakil-wakil yang dipilih dari 16 negara bagian dengan pembagian secara proporsional. *Bundesrat* juga memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan federal (German Federal Foreign Office, 2008: 61-67). Setiap parlemen negara bagian mengirimkan perwakilan ke *Bundesrat*. Jumlah perwakilan negara bagian ditentukan dari populasi negara bagian tersebut. Seperti Negara Bagian Nordrhein-Westfalen, negara bagian dengan populasi terbanyak mengirimkan 6 perwakilan, Sementara, Bremen, negara bagian dengan populasi paling sedikit, hanya mengirimkan 3 perwakilan. Jadi, jumlah wakil di *Bundesrat* dari beberapa negara bagian yang penduduknya padat akan mewakili lebih banyak perwakilan, bila dibandingkan negara bagian yang berpenduduk rendah. Jumlah anggota *Bundesrat* Jerman saat ini adalah 69 orang.

Bundesrat bahkan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses legislasi nasional (Donald P. Kommers, 1997: 97). Bahkan *Bundesrat* juga dapat ikut dalam proses administrasi pemerintahan federal serta hal yang menyangkut keanggotaan Jerman dalam Uni Eropa. Majelis Tinggi Jerman ini dipilih oleh pemerintah negara bagian, dan komposisi keanggotannya hanya berubah pada saat

Lander melaksanakan pemilihan umum. Artinya, setiap konstituen dalam pemilihan umum di negara bagian hanya bisa mempengaruhi *Bundesrat* secara tidak langsung (Frank Feulner, 2005: 30). Pembentukan *Bundesrat* di Jerman pada dasarnya untuk menjamin agar tidak terjadi kontradiksi antara pemerintah pusat dan pemerintahan negara bagian (Konrad Reuter, 2009: 11).

Dalam proses legislasi, *Bundesrat* memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan Undang-Undang. Namun *Basic Law* Jerman telah menentukan rancangan Undang-Undang mana saja yang mendapat persetujuan *Bundesrat*. Antara lain rancangan Undang-Undang untuk mengamandemen konstitusi, rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi negara bagian, serta rancangan Undang-Undang yang mempengaruhi kondisi keuangan negara. Rancangan Undang-Undang yang berkaitan pada pelaksanaan administrasi *Lander* ini yang membuat posisi *Bundesrat* turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu di setiap negara bagian.

Selain membahas mengenai *Bundestag* dan *Bundesrat*, negara Jerman juga memiliki kepala pemerintahan yang disebut sebagai Kanselir (*Bundeskanzle*). Kanselir dipilih dan bertanggung jawab kepada *Bundestag*. Kanselir dapat menunjuk menteri-menteri dalam membentuk kabinet, diantaranya mulai dari Menteri Kesehatan hingga Menteri Pertahanan. Kanselir juga bertugas untuk memimpin pemerintahan atau militer bila ada keadaan yang mendesak. Kanselir yang sedang menjabat saat ini di Jerman pasca pemilihan umum tahun 2017 adalah Angela Merkel. Jika kita lihat, Kanselir ini mirip dengan Perdana Menteri. Oleh karena itu, Jerman diklasifikasikan sebagai negara dengan sistem parlementer.

Partai-partai politik merupakan aktor utama dalam sistem perpolitikan di Jerman. *Article 21 Basic Law* menyebutkan "*The political parties participate in the forming of the political will of the people*". Dengan demikian, partai politik di Jerman berfungsi untuk memfasilitasi kehendak dan suara rakyat. Selain itu, sistem pemilihan umum disana menerapkan sistem *proportional representation*. Artinya, tidak mungkin ada partai politik yang bisa mencapai suara mayoritas

dalam pemilu tanpa melakukan koalisi dengan partai politik lain. Dampak dari sistem ini selalu menghasilkan pemerintahan koalisi di negara Jerman.

Kemudian dalam sistem parlementer, wewenang *Bundestag* adalah untuk mengawasi berjalannya pemerintahan federal agar tetap stabil, dan berhak mengeluarkan mosi tidak percaya. Akibat dari mosi tidak percaya ini adalah dipercepatnya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Oleh karena itu, partai-partai politik Jerman diperlukan untuk membentuk koalisi dalam membentuk pemerintahan baru. Hal ini berguna untuk meminimalkan tekanan oposisi dalam *Bundestag* agar prosesnya dapat berjalan secara efektif. Selain itu dengan adanya mosi tidak percaya, *Bundestag* juga berhak menarik mandatnya untuk memilih pengganti Kanselir Jerman yang baru. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadi adanya pemerintahan yang kosong tanpa seorang kanselir. Sistem demokrasi parlementer yang mulai diterapkan pada 1949, memaksa partai politik untuk berkoalisi agar dapat memenangkan calon yang mereka ajukan.

Sistem politik negara Jerman pada dasarnya selalu dikelilingi dengan konsensus (Jaggard, 2007: 324). Baik konsensus mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri ataupun kebijakan-kebijakan penting lain di dalam negeri. Konsensus adalah kesepakatan bersama mengenai suatu pendapat, pendirian atau sebagainya yang dicapai melalui musyawarah. Dalam capaian sebuah konsensus biasanya selalu didahului dengan musyawarah atau perundingan-perundingan antar partai-partai untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang lebih baik. Seringkali terjadi adanya suatu konsensus antara koalisi partai pemerintah dengan koalisi partai oposisi. Hal ini bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jerman dapat berjalan dengan efektif dan meminimalkan munculnya hambatan-hambatan dalam prakteknya (Jaggard, 2007: 19). Selain itu, partai-partai politik yang tidak dapat terwakili dalam *Bundestag* seringkali menjadi bagian dari koalisi pemerintahan ataupun menjadi kelompok oposisi dalam parlemen. Hal ini menjadi peluang dan kesempatan bagi partai-partai kecil dalam membawa agenda perjuangannya ke dalam parlemen, baik sebagai partai oposisi ataupun *partner* koalisi di pemerintahan.

Sistem pemilihan umum di Jerman diklasifikasikan sebagai sistem proporsional yang dipersonalisasi ("*Personalisierte Verhältniswahl*") atau sistem *Mixed Member Proportional* (MMP). Pada hakikatnya sistem ini adalah cara yang menggabungkan suara personal di distrik berwakil tunggal dengan prinsip perwakilan proporsional. Sistem diatas merupakan sistem campuran dimana semua pemilih menggunakan sistem pemilihan pertama. Biasanya sistem pluralitas atau mayoritas untuk memilih beberapa perwakilan dalam suatu badan terpilih. Selanjutnya sisa kursi dialokasikan kepada partai-partai dan kelompok-kelompok menggunakan sistem pemilu kedua. *Bundestag* terdiri dari 598 orang dan dipilih melalui sistem Representasi Personal Proporsional (*personalisierte Verhältniswahl*). 299 orang dipilih melalui sistem *first-past the post* (suara terbesar yang menang) dan mewakili satu konstituensi. Sisanya, dipilih melalui *Zweitstimme* (Suara kedua).

Sistem *first-past the post* (sistem distrik) ditandai dengan adanya pembagian wilayah nasional ke dalam sejumlah distrik atau daerah pemilihan. Masing-masing distrik memilih atau memperebutkan satu orang anggota dewan. Dalam hal ini, para pemilih hanya menjatuhkan pilihannya pada salah satu calon dari sekian calon yang muncul. Hanya yang dianggap terbaik yang akan di pilih. Calon yang terpilih menjadi anggota dewan adalah calon yang memperoleh suara tertinggi (Worldpolicy, 2016). Sedangkan calon yang memperoleh dukungan nomer dua dan dibawahnya, tidak terpilih.

Dalam *Multi-Member Systems*, Jerman menggunakan sistem *Closed Party List*. Pemilih hanya menjatuhkan pilihannya pada salah satu partai peserta pemilihan umum. Dengan sistem ini, partai membuat daftar atau *list* para calon anggota. Urutan para calon juga di tentukan oleh masing-masing partai. Seluruh suara dihitung dan tiap-tiap partai memperoleh kursi di parlemen sesuai dengan perolehan suaranya. Jumlah suara tertentu diperlukan oleh sebuah partai untuk memungkinkan seseorang yang dicalonkan bisa terpilih menjadi anggota dewan. Mereka yang terpilih pada umumnya adalah mereka yang menempati urutan atas. Para pemilih tidak bisa memilih secara langsung nama calon yang diajukan oleh partai. Mereka hanya bisa memilih partainya saja. Dengan demikian, sistem

pemilihan umum di Jerman yang menggunakan sistem *Mixed Member Proportional System* adalah kombinasi antara *first-past the post system* dengan *Party List System* atau sistem perwakilan proporsional (*proportional representation*).

Dalam parlemen Jerman, *Bundestag* dipilih setiap 4 tahun sekali secara bebas, rahasia, dan secara langsung oleh warga Jerman mulai usia 18 tahun yang telah memiliki hak pilih (Detik.com, 2011). Parlemen Jerman (*Bundestag*) dipilih melalui sistem pemilihan langsung yang diadakan di 16 negara bagian Jerman, selebihnya melalui sistem pemilihan proporsional berdasarkan daftar kandidat. Terdapat 299 distrik yang menjadi tempat untuk menyelenggarakan pemilihan umum tersebut. Pemilihan anggota parlemen federal tidak dilaksanakan secara bersamaan, tetapi secara berjenjang. Setiap konstituen Jerman memilih dua kali di atas satu surat suara. Dengan suara pertama (*Erstimme*), konstituen memilih nama seorang kandidat partai politik (pemilihan langsung). Kemudian kandidat dengan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan akan langsung masuk dalam parlemen. Sistem ini disebut dengan sistem pemilihan mayoritas. Dengan suara kedua (*Zweitstimme*), konstituen memilih nama satu partai politik. Jumlah perolehan suara satu partai akan menentukan jumlah kursi yang direbut di kursi *Bundestag*. Sistem ini merupakan pemilihan tidak langsung di Jerman. Siapa yang menjadi anggota parlemen ditentukan oleh partai politik sesuai perolehannya saat pemilu, dengan menyusun daftar kandidat berdasarkan nomor urut. Sistem ini disebut sebagai sistem pemilihan proporsional. Uniknya negara Jerman, seseorang boleh mencalonkan diri lewat sistem distrik maupun melalui sistem proporsional dalam sebuah pemilihan umum secara bersamaan.

Stimmzettel
für die Wahl zum Deutschen Bundestag
im Wahlkreis 5 Kiel
am 18. September 2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme

für die Wahl
eines
Wahlkreisabgeordneten

Erststimme

hier 1 Stimme

für die Wahl
einer Landesliste (Partei)
- maßgebende Stimme für die
Verteilung der Sitze insgesamt
auf die einzelnen Parteien -

Zweitstimme

1	Dr. Bartels, Hans Peter Kiel Eismühlstraße 16 SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands	<input type="radio"/>	SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands Dr. Uwe Gellert Wenzel, Bettina Fingelberg, Frank Thomsen, Gabriele Müller-Uhlir, Sabine Iller
2	Dr. Murrmann, Philipp Hohenstedt Hardenbergstraße 3 CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands	<input type="radio"/>	CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands Wolfgang Bismann, Dr. Det. Schröder, Axel Kahler, Udo Barchfeldt, Gero Dörflinger
3	Müller, Klaus Weggenhusen Kiel Wittelsbinderstraße 29 GRÜNE BÜNDNIS 90/GRÜNE	<input type="radio"/>	GRÜNE BÜNDNIS 90/GRÜNE Klaus Müller, Rainer Bockholt, Michaela Henning, Sebastian Daniel Trübs, Udo von Erling
4	Blumenthal, Sebastian Kampfenhorst Kiel Hornburger Chaussee 46 FDP Freie Demokratische Partei	<input type="radio"/>	FDP Freie Demokratische Partei Jürgen Kasperke, Dr. Ulfrike Wessmann-Korn, Barbara Eickhardt, Wolfgang Schöner, Dr. Michaela Blunk
5	Thorese, Björn Kampfenhorst Kiel Friedenstraße 97 DIE LINKE Die Linke	<input type="radio"/>	DIE LINKE Die Linke Ulrich Heuer, Hans Borch, Wolfram Meißner, Sören Thomsen, Brigitte Thomsen
6	Gutsche, Hermann Kiel Königsplatz 22 NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands	<input type="radio"/>	NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands Gerrit Schäfers, Jens Löffel, Jörg Thomsen, Wolfgang Schöner, Axel Henning
7	Mrozewski, Oliver Ahlbeck Ganghofer Straße 5 FAMILIE FAMILIE PARTI DEUTSCHLANDS	<input type="radio"/>	FAMILIE FAMILIE PARTI DEUTSCHLANDS Wolfgang Karpitz, Wilfried Kuban, Gertine Gump, Wilfried Karpitz
		<input type="radio"/>	MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands Andreas Hübner, Ingo Meißner, Andrea Jürgens Hübner, Johannes Sörenbaum, Marek Meyer

Gambar 3.1 Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Jerman

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Pada pilihan pertama (hitam), anda dapat memilih perwakilan konstituensi anda secara langsung melalui system *first-past the post* yang artinya suara terbesar yang menang. Meskipun suara terbesar tidak memenuhi mayoritas (50%), ia tetap terpilih sebagai anggota parlemen. Oleh karena itu, disediakan pilihan kedua (biru). Dalam pilihan ini anda dapat memilih partai mana yang di percaya untuk mewakili anda di parlemen. Berapa persen partai meraih kursi dalam parlemen ditentukan melalui pilihan kedua ini. Namun demikian, partai tetap mengikutkan 299 anggota yang sudah dipilih secara langsung. Dalam banyak kasus, banyak partai yang meraih kursi lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini disebut *overhang seats* (*Überhangmandate*). Agar hasil pemilu lebih representatif, maka seluruh partai ditambah kursinya secara persentase. Kursi tambahan ini disebut *Ausgleichsmandate* (*levelling seats*). Seperti yang terjadi pada Pemilu Federal 2017, dimana seharusnya terdapat 598 kursi, tetapi karena performa yang kuat oleh partai-partai kecil jumlah kursi meningkat menjadi 709 kursi. Sedangkan dalam menentukan jumlah kursi di *Bundestag* yang di peroleh suatu partai dengan menggunakan sistem proporsional, di dasarkan pada perolehan suara keseluruhan

secara nasional. Setelah dijumlah secara nasional, maka akan diketahui seberapa banyak suara yang diperoleh oleh suatu partai politik.

Namun demikian, sistem campuran ini dapat bermasalah, apabila sebuah partai politik kemudian mendominasi daerah atau distrik tertentu dan memenangkan banyak mandat langsung lewat perolehan suara pertama. Hal ini mengakibatkan jumlah kursi yang direbut dapat melebihi jatah kursi berdasarkan perolehan suara kedua. Artinya, partai politik ini memiliki kelebihan kursi. Hal ini disebabkan kandidat yang menang di satu daerah pemilihan harus langsung masuk dalam parlemen, dan kemenangannya tidak dapat dibatalkan. Kondisi yang demikian disebut mandat tambahan (*Überhangmandat*) yang sekilas telah dijelaskan diatas. Biasanya tambahan kursi tersebut merupakan hasil pengimbangan antara jumlah suara pertama dan suara kedua (Bischoff, 2015: 28-29).

Dalam *Überhangmandat*, cenderung hanya kandidat dari partai CDU, partai CSU dan partai SPD yang menang dalam pemilihan langsung di distrik. Oleh karena itu, partai-partai besar ini sebenarnya telah diuntungkan oleh sistem pemilu Jerman yang saat ini dianut. Pada tahun 2008, Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan bahwa aturan pemilu yang seperti itu tidak mencerminkan keinginan konstituen yang sebenarnya dan tidak relevan dengan konstitusi. Hal ini membuat Mahkamah kemudian memberikan batasan waktu sampai tahun 2011 untuk anggota legislatif dalam menemukan jalan keluar atau solusi yang tepat, adil serta mengganti aturan pemilu. Namun demikian, hingga saat ini *Bundestag* masih belum berhasil menemukan dan merumuskan aturan baru tentang mandat tambahan. Akhirnya, jumlah mandat tambahan ini dapat memperbesar jumlah kursi *Bundestag* secara keseluruhan, yang awalnya ditetapkan berjumlah 598 kursi.

Sulit bagi sebuah partai untuk secara mandiri membentuk pemerintahan dalam sistem pemilu di Jerman. Umumnya partai-partai ini membentuk persekutuan antar partai atau koalisi untuk meraih *absolute Mehrheit* (mayoritas). Agar tidak merumitkan perbandingan kekuatan karena munculnya partai-partai baru, maka Jerman memberlakukan ketentuan pembatas minimal sebesar 5% dari

suara nasional. Selain itu partai juga harus memenangkan minimal 3 konstituensi untuk memperoleh kursi di *Bundestag*. Jika perolehan suara satu partai politik menembus batas 5%, maka partai politik tersebut dapat meraih kursi *Bundestag*. Suara yang dihitung adalah suara kedua, dimana konstituen memilih nama partai. Namun aturan ini tidak berlaku jika satu partai dapat memenangkan mandat langsung di 3 distrik pemilihan. Hal ini karena mandat langsung ditentukan lewat suara pertama.

Walaupun ada ketentuan *parliamentary threshold* sebesar 5% atau memperoleh tiga kursi berdasarkan sistem pemilihan distrik, bukan berarti bahwa partai-partai yang kecil pendukungnya tidak dapat mengirimkan wakilnya ke *Bundestag*. Ada cara-cara tertentu yang mereka lakukan agar bisa lolos. Cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan koalisi dengan partai lain yang lebih besar serta melakukan “tukar-menukar” suara. Pada waktu pemilu, akan sangat sulit bagi partai-partai kecil untuk memenangkan calonnya dengan sistem pemilihan pemenang tunggal (sistem distrik). Oleh karena itu, para pemilih dari partai kecil “meminjamkan” suaranya kepada partai besar yang menjadi koalisinya. Suara pertama dari pemilih yang berasal dari partai kecil diberikan kepada calon yang berasal dari partai besar dan merupakan koalisinya. Dengan cara seperti ini, diharapkan calon yang berasal dari partai besar akan memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai wakil di distrik yang bersangkutan. Sebaliknya, para pemilih dari partai besar akan memberikan suara kedua kepada partai kecil yang merupakan koalisinya. Dengan cara ini, diharapkan partai kecil akan mendapatkan dukungan suara cukup banyak dan akan memperoleh suara minimum yang diperlukan (5%) untuk masuk ke *Bundestag*. Strategi tersebut seringkali dilakukan di Jerman.

Selain itu, di Jerman tidak mengenal pemilihan sela. Apabila seorang anggota *Bundestag* meninggal atau mengundurkan diri pada masa jabatannya, maka ia secara otomatis digantikan oleh calon yang berada pada urutan selanjutnya yang berasal dari negara bagian yang sama. Dalam menentukan calon partai untuk maju dalam suatu pemilihan, maka peranan pengurus partai sangat besar. Pengurus partai akan memilih calon yang dianggap baik untuk mewakili

partainya. Setelah itu, konvensi partai akan membuat penilaian akhir siapa yang secara resmi dicalonkan untuk berkompetisi dengan calon dari partai-partai politik lain. Karena seorang anggota partai bisa dicalonkan melalui sistem distrik dan sistem proporsional secara bersamaan, maka bila ia terpilih melalui sistem distrik, ia secara otomatis membatalkan pencalonannya melalui sistem proporsional. Pencalonan dengan menggunakan sistem daftar nama akan memungkinkan calon anggota *Bundestag* kembali mencalonkan diri (*incumbent*). Para pengurus partai yang menonjol ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pengurus partai, cenderung memperoleh nomor pencalonan pada urutan atas. Maka kesempatan mereka terpilih juga semakin besar.

Sistem pemilihan umum ini tentunya berlandaskan pada *konstitusi* Jerman 1949 (*Das Grundgesetz*). Terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan dasar sistem pemilu Jerman, diantaranya adalah pasal 20, pasal 21, pasal 28, pasal 38, pasal 39, pasal 42, dan pasal 63.

Tabel 3.1 *Das Grundgesetz* Pemilu dan Praktiknya

<i>Das Grundgesetz</i>	Implementasi
Pasal 20 (1) : Republik Federal Jerman adalah negara federal yang demokratis dan sosial.	16 negara bagian di Jerman melakukan pemilihan umum untuk memilih Parlemen Federal (<i>Bundestag</i>).
Pasal 20 (2) : Semua kekuatan negara berasal dari rakyat. Hal ini digunakan oleh orang-orang dalam pemilihan umum dan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudisial.	Dalam pemilihan umum, rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya di <i>Bundestag</i> . Kemudian <i>Bundestag</i> memilih Kanselir Federal yang memimpin Jerman.
Pasal 21 (1) : Partai-partai politik Jerman harus ikut serta dalam pembentukan kemauan rakyat.	Voting anggota internal Partai SPD pada tahun 2013 yang memperbolehkan pimpinan partai untuk membangun koalisi dengan fraksi Union pada tingkat federal.

	Dengan demikian, partai politik merupakan sarana dalam menampung pendapat masyarakat.
Pasal 28 (1) : Konstitusional di negara-negara harus mengikuti prinsip-prinsip republik, demokratis dan negara konstitusional sosial dalam arti Hukum Dasar ini. Negara-negara, kabupaten dan kota, rakyat harus memiliki representasi yang terdiri dari pemilihan umum, segera, bebas, sama dan rahasia. Dalam pemilihan di distrik dan kotamadya, warga negara harus sesuai dengan hukum Uni Eropa dan memenuhi syarat.	Dalam pemilihan tingkat distrik, rakyat harus berpartisipasi melalui pemilihan umum. Namun demikian, pada kenyataannya, tidak semua warga negara berpartisipasi dalam memilih wakil-wakilnya. Hal ini terlihat pada jumlah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2013 sebanyak 71,5%, sedangkan pada pemilihan umum tahun 2017 sebesar 76,5%.
Pasal 38 (1) : Anggota <i>Bundestag</i> Jerman dipilih secara umum, langsung, bebas, sama dan rahasia. Mereka adalah wakil dari seluruh rakyat, tidak terikat pada perintah dan instruksi dan hanya tunduk pada hati nurani mereka.	<i>Bundestag</i> dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum di setiap 299 distrik.
Pasal 38 (2) : Pemilih adalah mereka yang telah mencapai usia delapan belas tahun.	Pemilih yang bisa mengikuti pemilihan umum adalah mereka yang telah mencapai usia minimal 18 tahun.
Pasal 39 (1) : Tunduk pada ketentuan berikut, <i>Bundestag</i> dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Periode pemilihan berakhir dengan pertemuan	Pemilu untuk memilih anggota <i>Bundestag</i> Jerman dilakukan setiap 4 tahun sekali.

<p>Bundestag baru. Pemilihan baru akan berlangsung paling cepat empat puluh enam, tidak lebih dari empat puluh delapan bulan setelah awal legislatif. Dalam hal resolusi Bundestag, pemilihan baru berlangsung dalam enam puluh hari.</p>	
<p>Pasal 42 (2) : Untuk resolusi Bundestag, mayoritas suara diperlukan, sejauh UU Dasar ini tidak menyebutkan sebaliknya.</p>	<p>Partai yang menang dalam pemilu, harus mencapai kursi mayoritas dalam <i>Bundestag</i>. Jika belum tercapai, maka partai yang bersangkutan harus membangun koalisi dengan partai politik lain. Hal ini dilakukan agar menghindari suara minoritas yang dapat mengganggu kestabilan negara.</p>
<p>Pasal 63 (1) : Federal Chancellor akan dipilih oleh Bundestag tanpa perdebatan tentang usulan Presiden Federal.</p>	<p>Setelah pemilihan anggota <i>Bundestag</i> telah berlangsung, maka <i>Bundestag</i> memilih Kanselir yang mereka usulkan.</p>
<p>Pasal 63 (2) : Orang yang menerima suara mayoritas Anggota Bundestag akan dipilih. Orang yang terpilih akan diangkat oleh Presiden Federal.</p>	<p>Kanselir dipilih melalui suara mayoritas dalam <i>Bundestag</i>.</p>
<p>Pasal 63 (3) : Jika orang yang diusulkan oleh Presiden Federal tidak terpilih, Bundestag dapat memilih Federal Chancellor dalam empat belas hari setelah pemungutan suara oleh suara lebih dari satu setengah dari anggotanya.</p>	

<p>Pasal 63 (4) : Jika tidak ada Kanselir Federal yang dipilih dalam periode ini, pemilihan baru akan berlangsung tanpa penundaan, dimana orang yang menerima jumlah suara terbanyak harus terpilih. Jika orang yang terpilih menerima suara mayoritas Anggota Bundestag, Presiden Federal harus menunjuknya dalam waktu tujuh hari setelah pemilihan. Jika orang yang terpilih tidak menerima mayoritas seperti itu, lalu dalam waktu tujuh hari, Presiden Federal akan menunjuk dia atau membubarkan Bundestag.</p>	
---	--

(Sumber: Deutscher Bundestag. 2014. *Basic Law: for the Federal Republic of Germany*. Berlin: Germany Bundestag. Halaman: 7-16)

Beberapa pasal dalam *Das Grundgesetz* menjadi landasan dasar bagi pemilu Jerman. Selain itu, *Bundestag* juga memerlukan suara mayoritas dalam menjalankan pemeritahan baru. Dalam membangun koalisi bagi partai politik yang menang, namun belum mencapai kursi mayoritas, maka harus mencari *partner* koalisi dengan partai politik lain. Aturan lain yang lebih terperinci telah ditentukan dalam undang-undang federal.

Dalam *Das Grundgesetz*, memungkinkan terjadinya koalisi pada partai-partai politik Jerman walaupun berbeda ideologi. Hal ini telah tercantum pada konstitusi Jerman yang menjelaskan bahwa Jerman merupakan negara federal yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dan sosial. Hal ini juga telah dijelaskan dalam konstitusi Jerman tentang hak-hak dasar warga negara. Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perkembangan kepribadiannya secara bebas, sejauh ia tidak melanggar hak orang lain dan tidak melanggar

tatanan konstitusional atau hukum moral. Dalam menentukan *partner* koalisi, tergantung pada hak individu maupun kelompok atau partai yang bersangkutan.

3.2 Kemenangan Angela Merkel Pada Pemilihan Umum Jilid I – Jilid III

Kanselir Angela Merkel merupakan sosok pemimpin wanita yang mempunyai andil besar terutama dalam negaranya sendiri maupun dalam Uni Eropa. Ia merupakan kanselir wanita pertama dalam sejarah Jerman. Selain itu, ia merupakan kanselir yang empat kali menjabat secara berurutan mulai pemilu tahun 2005 hingga pemilu 2017. Dengan demikian penulis menjelaskan hasil perolehan pemilu yang dimenangkan oleh Angela Merkel sebelumnya.

3.2.1 Pemilihan Umum Jerman Tahun 2005

Jabatan Kanselir Jerman sebelum periode Angela Merkel, diisi oleh Gerhard Schroder. Dalam masa pemerintahannya selama dua periode (1998-2002 dan 2002-2005), banyaknya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat Jerman membuat jumlah pengangguran di Jerman mengalami peningkatan. Alasan ini membuat Gerhard Schroder mengajukan mosi kepercayaan kepada *Bundestag*. Ia mengajukan mosi kepercayaan karena merasa tidak yakin bahwa pemerintahannya dapat menjalankan roda politik pembaharuan. Dengan demikian, ia mengusulkan untuk melakukan pemilihan umum baru. Hasilnya anggota parlemen (*Bundestag*) menolak mosi kepercayaan dan memutuskan untuk melakukan pemilu baru pada tanggal 18 September 2005.

Partai politik dalam pemilihan umum Jerman di tahun 2005, adalah fraksi Union (Partai CDU dan Partai CSU), Partai SPD, Partai FDP, Partai Kiri, dan Partai Hijau. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, fraksi Union memenangkan pemilu dengan perolehan suara terbanyak. Berikut merupakan tabel hasil pemilu Jerman tahun 2005.

Tabel 3.2 Hasil Pemilihan Umum Jerman Tahun 2005

Partai Politik	Persen Suara (%)	Kursi <i>Bundestag</i>
Union (Partai CDU dan Partai CSU)	35,2	225
Partai SPD	34,3	222
Partai FDP	9,8	61
Partai <i>Die Linke</i> (Partai Kiri)	8,7	54
Partai Hijau	8,1	51

(Sumber: Koran harian Kompas. 2005. *Merkel gagal tarik Partai Hijau untuk koalisi*. 24 September 2005. Halaman: 4)

Selain partainya memenangkan pemilu, pada tahun 2005 Angela Merkel juga memenangkan voting anggota *Bundestag* pada tanggal 22 November 2005 sehingga resmi menjabat sebagai Kanselir Jerman. Pembentukan pemerintahan Jerman pasca pemilihan umum tahun 2005 menghasilkan koalisi antara fraksi Union dan Partai SPD (*Grand Coalition*). Pembentukan koalisi pada pemilu ini hanya membutuhkan waktu 3 pekan pasca pemilu dan berhasil melewati perundingan yang sulit dan mengakhiri krisis politik di Jerman. Namun demikian, kesepakatan ini menguntungkan Partai SPD yang berhasil mendapatkan lebih banyak kursi Kabinet daripada Union.

Berdasarkan kesepakatan, Partai SPD memperoleh 8 jabatan di Kabinet, antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perburuhan, Menteri Kehakiman, Menteri Lingkungan, Menteri Bantuan dan Koperasi, serta Menteri Kesehatan dan Menteri Transportasi. Sedangkan Union memperoleh 6 jabatan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, dan Menteri Keluarga (Suara Karya, 2005).

3.2.2 Pemilihan Umum Jerman Tahun 2009

Periode selanjutnya, pemilu Jerman dilaksanakan tepat pada tanggal 27 September 2009. Terdapat perbedaan yang mencolok pada pemilu Jerman di tahun ini. Hal ini karena semakin naiknya popularitas partai-partai kecil di Jerman. Partai-partai kecil memperoleh suara yang semakin meningkat bila dibandingkan dengan pemilu tahun 2005. Sementara, partai-partai besar mengalami penurunan suara. Kondisi ini khususnya terjadi pada Partai SPD yang kehilangan 10% suara atau dapat dikatakan kehilangan 76 kursi *Bundestag*. Selain itu, Partai CDU juga mengalami penurunan sebanyak 1,4% suara. Lain halnya dengan Partai FDP, partai ini mengalami kenaikan suara pada pemilu Jerman 2009. Perolehan suara Partai FDP naik sekitar 5% bila dibandingkan pemilu sebelumnya. Berikut merupakan gambar hasil pemilu Jerman tahun 2009.



Gambar 3.2 Hasil Pemilihan Umum Jerman Tahun 2009

(Sumber: DW. 2009. Pemenang Sudah Diketahui, Perundingan Koalisi Dimulai. https://www.dw.com/image/4730077_7.jpg 4-7-2018. Diakses pada tanggal 5 Juli 2018)

Meningkatnya perolehan suara Partai FDP karena adanya perubahan konstituen dari partai besar, terutama Partai CDU dan Partai SPD. Sekitar satu

juta pendukung Partai CDU dan sekitar 500.000 pendukung dari Partai SPD beralih memilih Partai FDP pada pemilu tahun ini. Kenaikan perolehan suara Partai FDP juga bersamaan dengan kenaikan perolehan suara Partai Hijau dan Partai *Die Linke*. Pemilihan umum tahun 2009 Partai Hijau meraih 10,7% suara. Angka tersebut naik sekitar 2,5% dari perolehan pemilu tahun 2005. Suara Partai Hijau diraih dari kalangan konstituen muda, kaum perempuan, pelajar, dan pegawai negeri (DW, 2009). Partai kecil lainnya yang mengalami kemajuan adalah *Die Linke*. Perolehan Partai Kiri ini bahkan melebihi perolehan Partai Hijau.

Sementara, Kanselir Angela Merkel mulai melakukan perundingan koalisi dengan Partai FDP pada tanggal 28 September 2009. Ia percaya bahwa koalisi “Hitam-Kuning” ini dapat mengubah sejumlah kebijakan politik, terutama masalah keuangan dan politik pajak. Mengingat, partai oposisi pada pemilu 2009 melibatkan partai politik besar di Jerman, seperti Partai SPD dan Partai Hijau. Menurut sistem pemilu Jerman, jumlah kursi yang perebutkan berjumlah 598 kursi. Namun demikian, jumlah ini dapat bertambah dengan aturan mandat langsung dan mandat tambahan. Dengan demikian, diperkirakan jumlah kursi parlemen pada pemilu 2009 bertambah menjadi 622 kursi.

3.2.3 Pemilihan Umum Jerman Tahun 2013

Setelah Angela Merkel dan Partai CDU memimpin Jerman dalam 2 periode, pada tanggal 22 September 2013 negara Jerman kembali melaksanakan pemilu setiap 4 tahun sekali. Pemilu di tahun ini merupakan kekalahan bagi Partai FDP yang akhirnya harus berjuang untuk menembus *electoral threshold* atau kuota 5% suara agar dapat lolos dan memperoleh kursi *Bundestag*. Kondisi tersebut membuat fraksi Union tidak dapat membangun koalisi lagi dengan Partai FDP. Sementara dipihak lain, Partai SPD berniat untuk menjalin koalisi pemerintahan dengan Partai Hijau. Namun demikian, perolehan suara partai Hijau pada pemilu 2013 diperkirakan hanya sekitar 9% suara. Kondisi ini akhirnya menimbulkan alternatif lain, yaitu dengan membangun koalisi pemerintahan antara Partai SPD-Partai Hijau-Partai *Die Linke*. Namun sejauh ini, Partai SPD

dan Partai Hijau dengan tegas menolak koalisi semacam itu (DW, 2013). Berikut merupakan tabel hasil akhir pemilu Jerman tahun 2013.

Tabel 3.3 Hasil Pemilihan Umum Jerman Tahun 2013

Partai Politik	Persen Suara (%)
Union (Partai CDU dan Partai CSU)	41,5
Partai SPD	25,7
Partai FDP	4,8
Partai Hijau	8,4
Partai Kiri (<i>Die Linke</i>)	8,6

(Sumber: Tempo.co. 2013. Partai Merkel Menangi Pemilu Jerman. <https://dunia.tempo.co/read/515703/partai-merkel-menangi-pemilu-jerman>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2018)

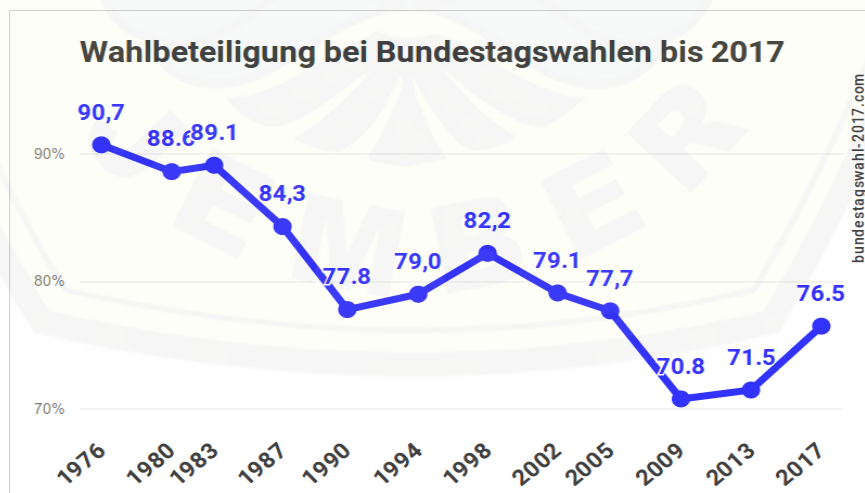
Hasil pemilu Jerman 2013 tetap di menangkan oleh fraksi Union. Pemilu ini merupakan jabatan 3 periode Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman. Namun demikian, kemenangan Partai CDU kali ini diikuti oleh kekalahan mitra koalisi pada pemerintahan sebelumnya, yaitu Partai FDP yang tidak berhasil menembus batas “*treshold*” atau kuota 5% suara. Kondisi tersebut membuat beberapa perkiraan koalisi untuk pemerintahan baru Jerman, yaitu koalisi antara fraksi Union-Partai SPD atau fraksi Union-Partai Hijau. Namun demikian, kecil kemungkinan bagi Partai CDU untuk dapat berkoalisi dengan Partai Hijau. Hal tersebut karena kebijakan kedua partai yang sangat berbeda (Tempo, 2013).

Pasca pemilihan umum Jerman tahun 2013, setelah melewati perundingan negosiasi dalam membentuk koalisi, Angela Merkel dan partainya akhirnya membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai SPD. Koalisi ini pernah terjadi pada periode tahun 2005 hingga tahun 2009. Selain kembali membangun koalisi dengan Partai SPD, jumlah partisipasi masyarakat Jerman pada pemilu di tahun ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sekitar 62 juta konstituen atau sekitar 73% telah berpartisipasi dalam pemilihan umum Jerman di tahun 2013.

3.3 Hasil Pemilihan Umum Jerman Tahun 2017

Pemilihan Umum Jerman yang dilaksanakan pada bulan September 2017 menarik perhatian masyarakat dunia. Hal ini karena masuknya Partai AfD yang merupakan partai alternatif berhaluan kanan jauh di Jerman. Partai ini selalu mengkritik kebijakan Angela Merkel selama ini, khususnya masalah agama Islam dan pengungsi. Selain itu, faktor yang menarik lainnya adalah munculnya hambatan Partai CDU dan Angela Merkel dalam membentuk pemerintahan baru pada periode ini. Pada subbab ini penulis akan menjelaskan secara detail hasil perolehan pemilu Jerman tahun 2017 yang dirasa sangat unik untuk dibahas.

Dalam pemilihan umum di Jerman yang dilakukan pada tahun 2017, tingkat partisipasi masyarakat mengalami peningkatan 5% bila dibandingkan dengan pemilihan umum pada 2013 (Bundestagswahl, 2017). Pada tahun 2017, jumlah pemilih yang terdaftar sebesar 61.675. 529 jiwa. Sedangkan pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada September 2017, jumlah kehadiran pemilih sebesar 46.973.799 jiwa (76,2%). Pemilihan di Jerman dipakai sebagai indikator tingkat kepuasan terhadap pemerintah ataupun popularitas oposisi pada tingkat federal. Dalam kalangan pemilih Jerman, terdapat indikasi bahwa semakin tinggi status sosial dan ekonomi seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi politiknya.

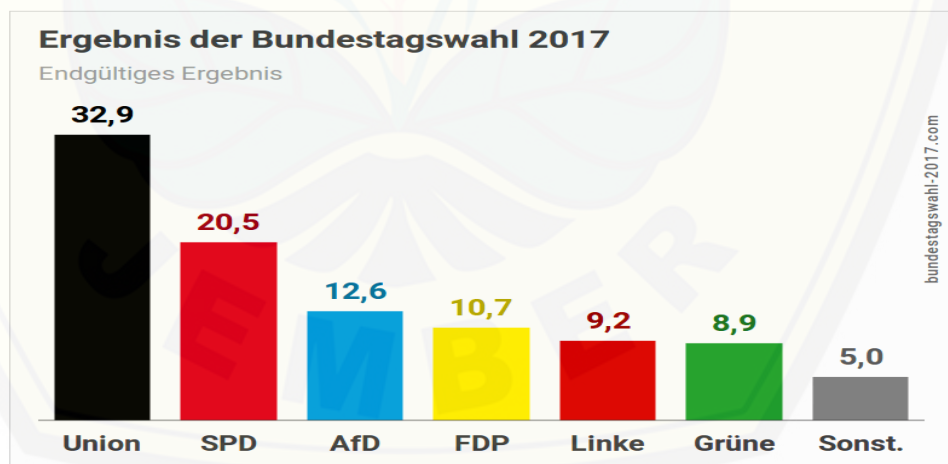


Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi Pemilu Jerman tahun 1976 – tahun 2017

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Dalam grafik diatas, partisipasi warga negara Jerman dalam pemilihan umum pada 2017 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71,5%, sedangkan pada 2017 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 76,5%. Maka, selisih dari perbandingan tersebut sebesar 5%.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat Jerman dalam pemilihan tahun 2017 cenderung rendah. Padahal dalam pemilu untuk memilih kanselir sebagai kepala pemerintahan suatu negara akan di tentukan dengan tingkat partisipasi dari warga negara. Pemilihan umum akan dianggap sukses jika partisipasi masyarakat terus meningkat. Terdapat keterikatan antara partisipasi masyarakat dengan hasil dari pemilihan umum di Jerman yang dilakukan pada 2017. Hasil akhir di menangkan oleh Union (koalisi dari partai *Christlich Demokratische Union (CDU)* dan *Christlich Soziale Union*), dan partai *Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)* pada urutan kedua.



Gambar 3.4 Hasil Akhir Pemilihan Umum Jerman (Persentase)

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Hasil pemilihan umum Jerman dari tabel diatas menunjukkan bahwa Union (*Christlich Demokratische Union (CDU)* dan *Christlich Soziale Union*)

memperoleh 32,9% suara. Sedangkan partai *Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)* menempati urutan kedua dengan perolehan 20,5%. Dalam hasil akhir pemilihan ulang 2017, Partai AfD berhasil menempati urutan ketiga dengan 12,6% suara. Perolehan ini merupakan capaian tertinggi Partai AfD sejak kemunculannya dalam partai politik di Jerman. Kemudian pada urutan ke empat dengan perolehan 10,7% diraih oleh Partai *Freie Demokratische Partei (FDP)*. Hasil perolehan Partai AfD dan Partai FDP hanya selisih 1,9% suara. Selisih ini merupakan capaian yang baik bagi Partai AfD, mengingat partai ini merupakan partai yang baru terbentuk dan sangat nasionalis. Sedangkan Partai *Die Linke* hanya memperoleh 9,2 % suara. Kemudian disusul oleh Partai Hijau yang memperoleh 8,9%. Pada urutan terakhir dengan perolehan 5% ditempati oleh partai-partai lain yang kurang mendominasi dalam perpolitikan di Jerman.

Dari hasil diatas, perolehan partai politik Jerman dalam pemilihan umum akan menentukan jumlah kursi dalam parlemen (*Bundestag*). Berikut merupakan gambar yang dapat menjelaskan jumlah kursi setiap partai dalam parlemen.



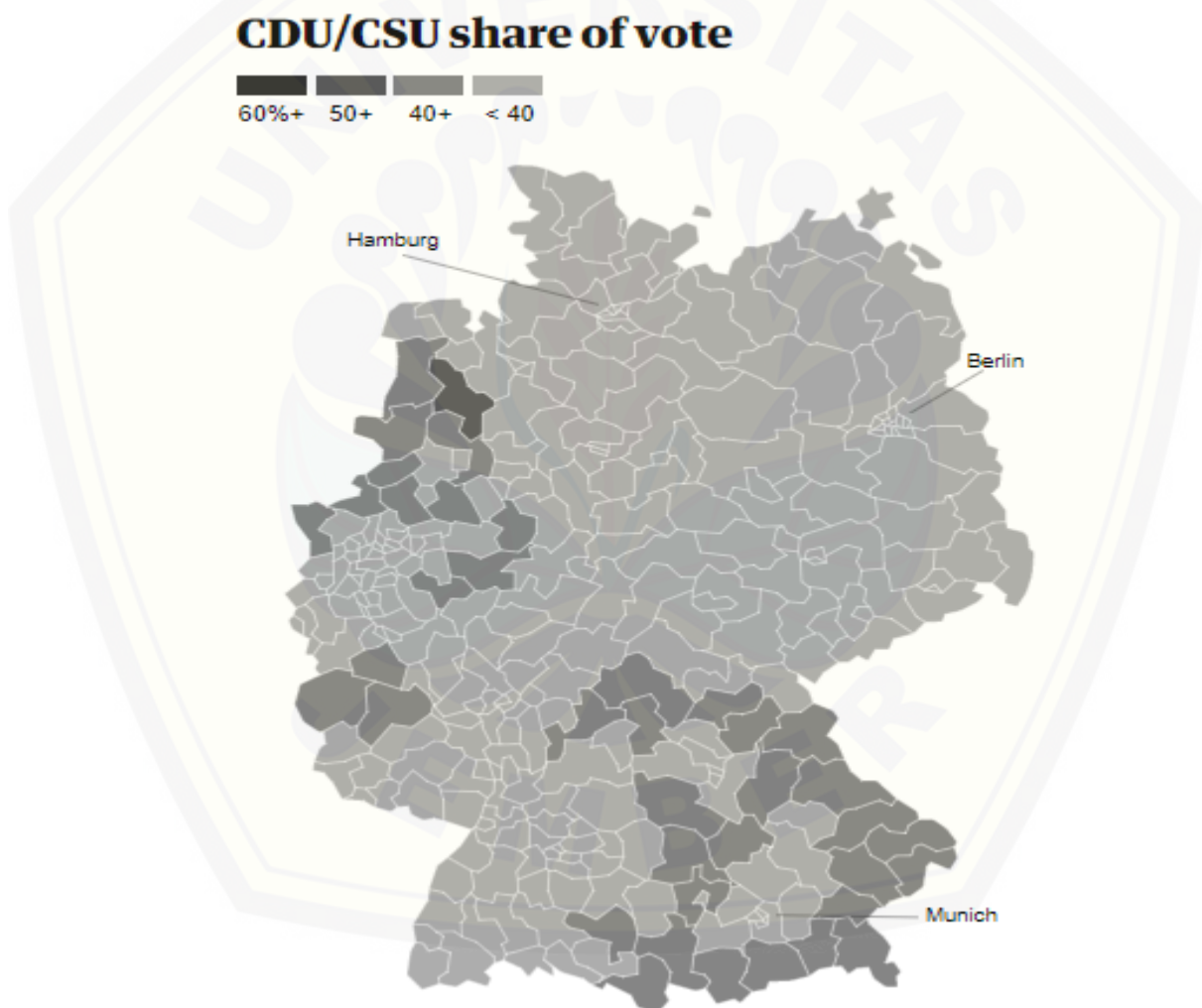
Gambar 3.5 Hasil Pemilihan Umum (709 kursi *Bundestag*)

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Dengan perolehan 32,9% Partai *Christlich Demokratische Union (CDU)*, dan *Christlich Soziale Union (Union)* memperoleh jumlah kursi terbanyak sebesar 246 kursi di *Bundestag*. Kemudian *Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)*

memperoleh 153 kursi. Partai AfD yang berhasil memasuki kursi *Bundestag* untuk pertama kalinya mendapatkan 94 kursi. Selanjutnya dengan jumlah kursi Partai *Freie Demokratische Partei (FDP)* 80 kursi, 69 kursi untuk Partai *Die Linke*, dan 67 jumlah kursi bagi Partai Hijau.

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan hasil suara fraksi Union setiap distrik di Jerman. Perolehan suara di ilustrasikan menggunakan warna. Setiap perubahan warna dalam gambar menunjukkan perkiraan perolehan suara fraksi Union di setiap distrik.

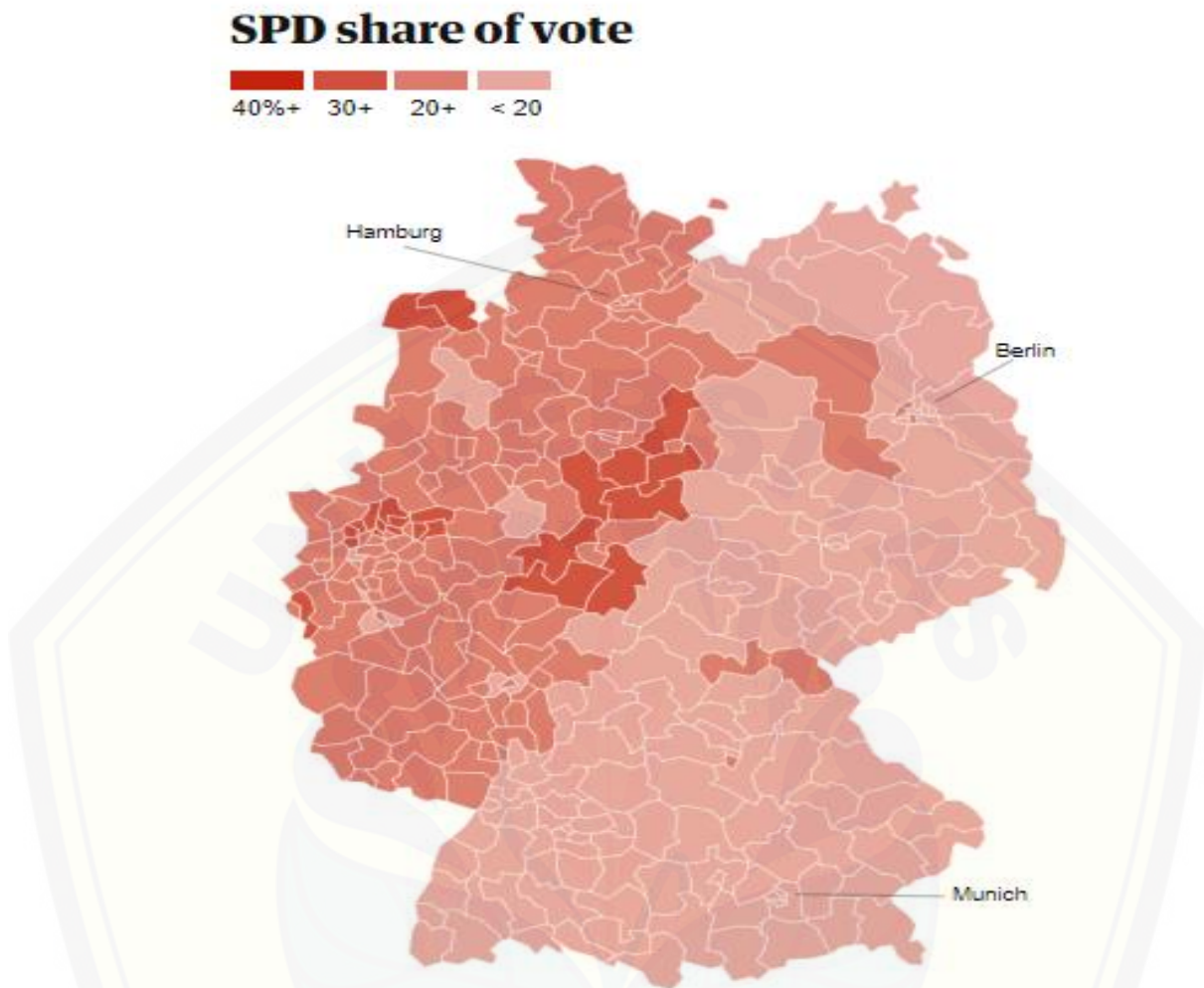


Gambar 3.6 Persebaran Suara Fraksi Union

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>.
Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Jumlah kursi dari setiap partai politik Jerman juga ditentukan oleh persebaran suara pendukung partai yang berada di 16 negara bagian Jerman. Gambar diatas merupakan peta wilayah negara Jerman. Dalam gambar tersebut, persebaran suara berdasarkan wilayah distrik di dominasi oleh warna abu-abu tua. Persebaran suara partai ini meliputi wilayah Baden-Württemberg, sebagian wilayah saarland, sebagian besar wilayah Rheinland-Pfalz, setengah dari wilayah Hessen, Thüringen, sebagian wilayah Sachsen, Brandenburg, sebagian di Berlin walaupun tidak terlalu dominan, Sachsen-Anhalt, sebagian wilayah Niedersachsen, sebagian besar wilayah Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, dan sebagian besar wilayah Schleswig-Holstein. Sedangkan Partai *Christlich Soziale Union (CSU)* sebagai partai lokal, memiliki persebaran suara di seluruh wilayah Bayern.

Berdasarkan gambar diatas, distrik yang di ilustrasikan dengan warna abu-abu tua memiliki suara fraksi Union dengan perolehan yang tinggi, sekitar 60% lebih. Sementara, wilayah distrik yang memiliki warna abu-abu muda atau warnyanya semakin memudar, maka perolehan suara fraksi Union di distrik tersebut mengalami penurunan. Kemenangan Partai CDU berada di distrik Cloppenburg-vechta dengan perolehan 53,1%. Sedangkan kekalahan Partai CDU sebagian besar berada di wilayah dan distrik bagian Jerman Timur.

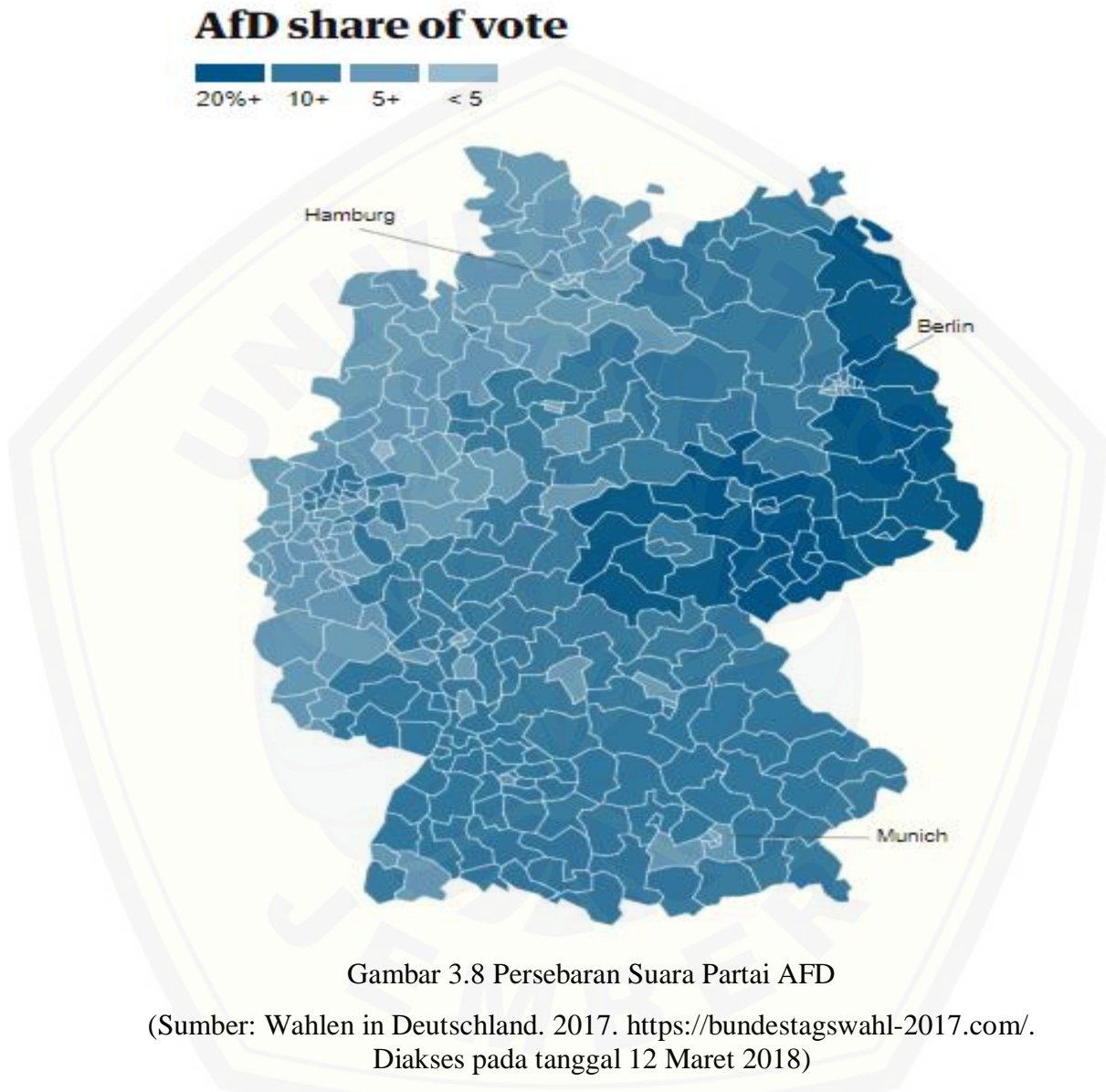


Gambar 3.7 Persebaran Suara Partai SPD

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Partai *Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)* yang dilambangkan dengan warna merah tersebar di beberapa wilayah negara bagian di Jerman, diantaranya sebagian kecil wilayah Saarland dan Rheinland-Pfalz, sebagian dari wilayah Hessen, Brandenburg, Niedersachsen, seluruh Bremen, sebagian besar wilayah Hamburg, Nordrhein-Westfalen, dan beberapa berada di wilayah Schleswig-Holstein. Berdasarkan gambar diatas, kemenangan Partai SPD berada di negara bagian Niederschsen, tepatnya di distrik Aurich-Emden dengan perolehan 37,8%. Perolehan ini merupakan hasil suara tertinggi Partai SPD bila dibandingkan dengan distrik-distrik lain di negara Jerman. Selain itu, kemenangan lain juga

berada di wilayah negara bagian Sachsen, khususnya di distrik Sachsen II dengan hasil 35,3%. Sedangkan kekalahan suara dari Partai CDU tersebar di sebagian wilayah Jerman Timur, Bayern, dan Baden Wurttemberg.

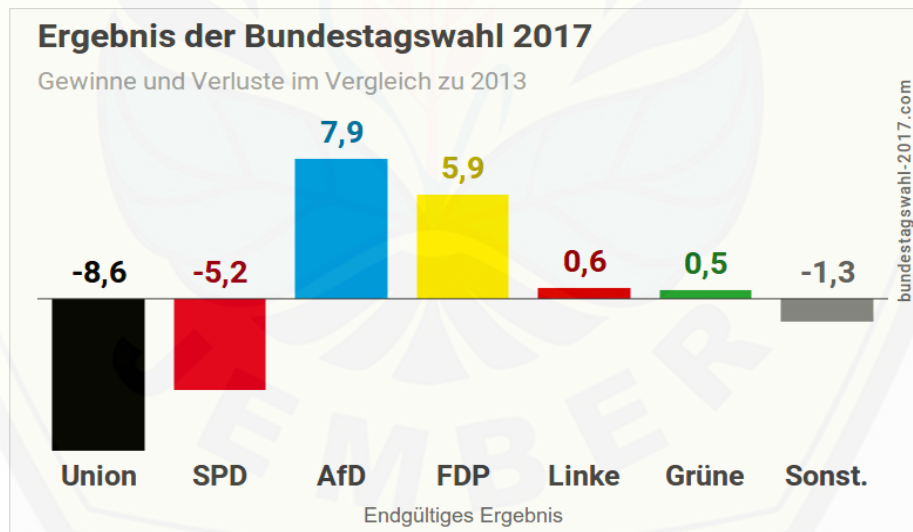


Persebaran suara berdasarkan wilayah yang mendukung Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) sebagai partai baru yang memasuki kursi parlemen berada di sebagian wilayah Sachsen. Tingkat partisipasi masyarakat di wilayah tersebut cenderung lebih banyak bila dibandingkan dengan wilayah di negara bagian lain. Dalam gambar, persebaran suara Partai AfD ini diwarnai dengan warna biru. Tingkat persebaran yang ditandai dengan warna dalam gambar diatas,

menunjukkan bahwa kemenangan Partai AfD berada pada distrik Gorlitz dan distrik Meiben dengan perolehan 32,9%. Sedangkan kekalahan partai ini sebagian besar berada pada distrik di wilayah Jerman Barat.

Sedangkan Partai FDP (*Freie Demokratische Partei*) dan Partai Hijau memiliki persebaran suara di wilayah Berlin. Persebaran suara berdasarkan wilayah dari partai *Die Linke* berada di sebagian kecil wilayah Sachsen dan Berlin. Namun demikian, banyaknya persebaran suara pada pemilihan umum tahun 2017 dari partai-partai yang telah dijelaskan diatas, ternyata mengalami penurunan maupun kenaikan bila dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 2013. Dinamika tersebut sangat berpengaruh pada tingkat elektabilitas partai politik di Jerman. Apabila suatu partai politik memiliki elektabilitas tinggi, maka partai tersebut merupakan partai politik yang mampu memajukan Jerman dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Gambar berikut merupakan perbandingan pada pemilihan umum tahun 2017 dengan pemilihan umum tahun 2013.

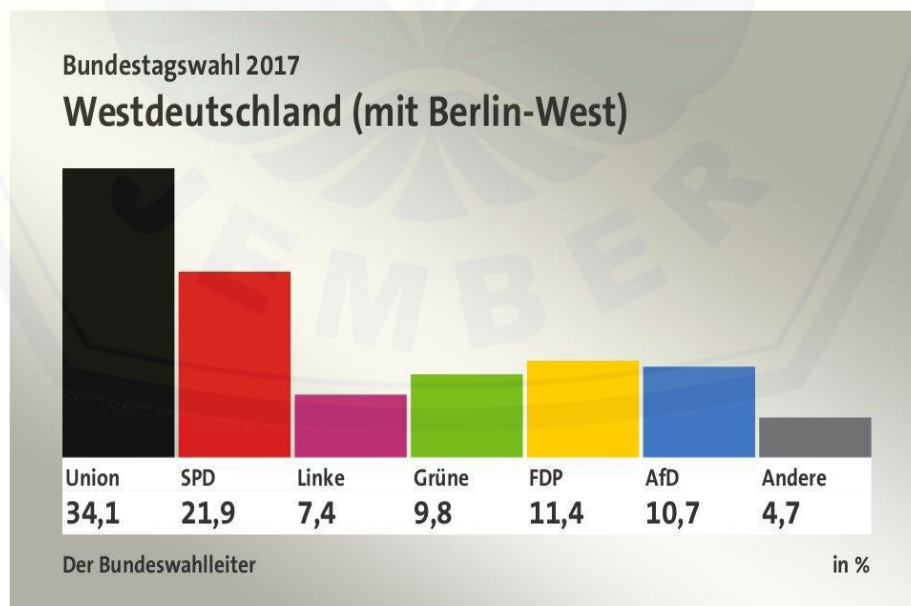


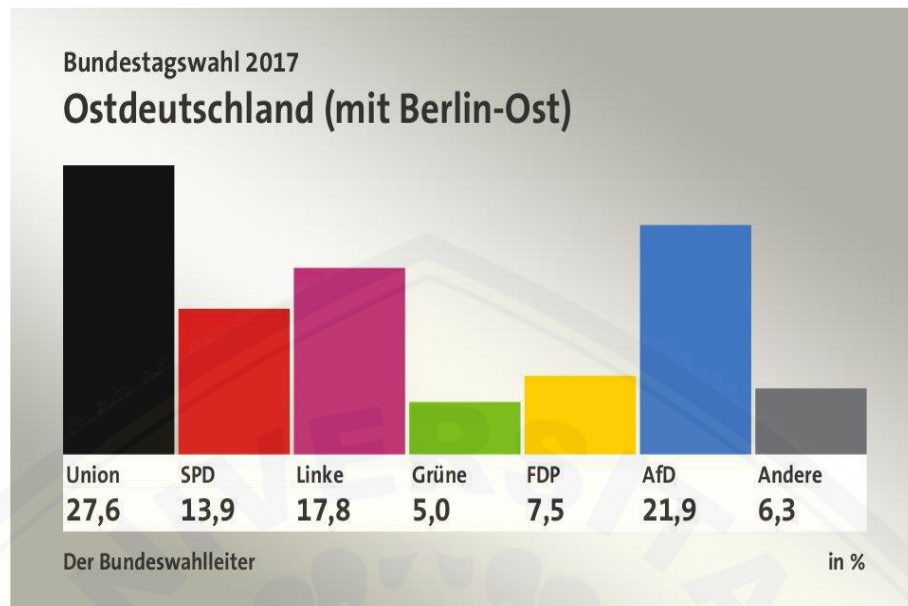
Gambar 3.9 Perbandingan Pemilihan Umum 2013 dengan 2017

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Bila dibandingkan dengan pemilu 2013, tingkat pemilih Union (*Christlich Demokratische Union (CDU)* dan *Christlich Soziale Union*) mengalami penurunan sebesar 8,6% pada pemilihan umum 2017. Begitu juga dengan Partai SPD (*Sozialdemokratische Partei Deutschland*) yang mengalami penurunan 5,2% pada pemilu 2017. Berbeda dengan kedua partai di atas, Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) mengalami kenaikan pada pemilu 2017 bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kenaikan tersebut mencapai 7,9%. Gambar di atas menunjukkan bahwa Partai AfD mengalami kenaikan suara pemilih bila dibandingkan dengan partai-partai politik lain di Jerman. Partai FDP (*Freie Demokratische Partei*) juga mengalami hal serupa. Partai ini mengalami kenaikan sebesar 5,9%. Selain itu, Partai *Die Linke* dan Partai Hijau sama-sama mengalami kenaikan sebesar 0,6% untuk *Die Linke* dan 0,5% untuk Partai Hijau. Dengan demikian, partai politik yang mendominasi di Jerman dan mengalami penurunan hanya Partai SPD (*Sozialdemokratische Partei Deutschland*) dan Union (*Demokratische Union (CDU)* dan *Christlich Soziale Union*).

Warga negara Jerman bagian Barat yang memilih partai politik dalam pemilu 2017 tentunya berbeda bila dibandingkan dengan warga negara yang berdomisili di Jerman bagian Timur.





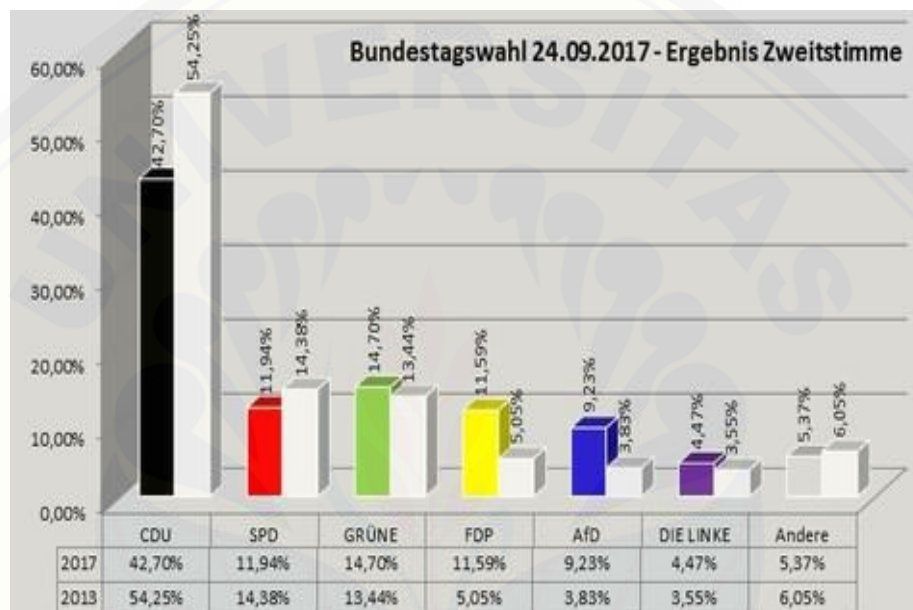
Gambar 3.10 Perbandingan Presentase Perolehan Suara Wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur Tahun 2017

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Kedua gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah pendukung Union (*Christlich Demokratische Union (CDU), Christlich Soziale Union*) dari Jerman bagian Barat lebih banyak 6,5% bila dibandingkan dengan Jerman bagian Timur. Jumlah pendukung Partai SPD (*Sozialdemokratische Partei Deutschland*) dari warga Jerman bagian Barat juga lebih banyak bila dibandingkan dengan wilayah Jerman bagian Timur. Selisih keduanya mencapai 8%. Hal ini tentunya berbeda dengan Partai *Die Linke* dan Partai AfD. Dalam gambar, pemilih Partai *Die Linke* mayoritas berasal dari wilayah Jerman bagian Timur. Apabila dibandingkan, selisih kedua wilayah mencapai 10,4%. Selisih tersebut berbeda dengan perolehan Partai AfD walaupun sama-sama kuat di wilayah Jerman bagian Timur. Partai AfD memperoleh selisih 11,2%. Angka tersebut merupakan perolehan selisih terbesar dalam perbandingan pemilih dari Jerman bagian Barat dan Jerman bagian Timur. Sedangkan Partai FDP (*Freie Demokratische Partei*) dan Partai Hijau memperoleh suara tertinggi di wilayah Jerman bagian Barat. Selisih suara Partai

FDP di kedua wilayah adalah 3,9% suara. Partai Hijau memiliki selisih suara sebanyak 4,8%.

Selain memperbandingkan presentase perolehan suara di wilayah Jerman bagian Timur dan Jerman Barat, terdapat perolehan suara partai yang mempengaruhi jumlah kursi di *Bundestag* dalam pilihan suara kedua di pemilu (*Zweitstimme*). Berikut merupakan gambar suara partai pada pemilihan umum 2017.



Gambar 3.11 Suara Partai (*Zweitstimme*) Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2017

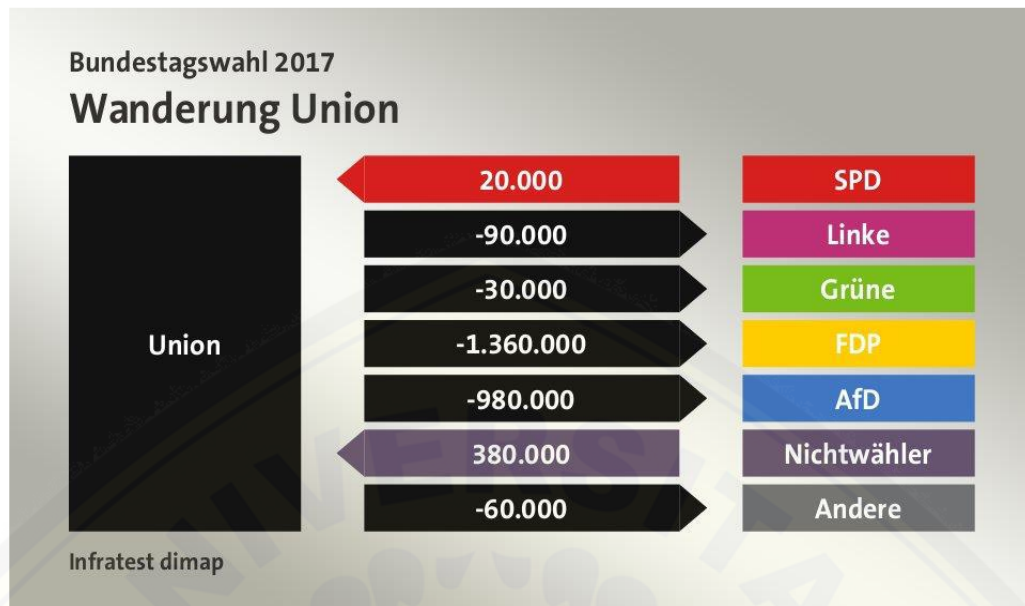
(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Pada pemilu Jerman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam satu kertas suara konstituen dapat memilih dua suara. Suara pertama konstituen akan memilih kandidat yang mewakili setiap distrik. Sedangkan pemilihan kedua konstituen memilih nama partai-partai politik yang terdaftar. Gambar diatas merupakan hasil persentase dari suara partai dalam pemilu (*Zweitstimme*). Selain menunjukkan hasil persentase, gambar diatas juga menunjukkan adanya perbandingan hasil presentase dari pemilu tahun 2013 dan pemilu tahun 2017. Hal ini untuk mempermudah dalam memahami adanya dinamika dari hasil suara partai poliitk.

Dalam gambar, suara Partai CDU (*Christlich Demokratische Union*) pada pemilu 2017 mencapai 42,70%. Bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang mencapai 54,25%, hasil tersebut mengalami penurunan. Partai SPD (*Sozialdemokratische Partei Deutschland*) juga mengalami penurunan hasil suara partai pada pemilihan umum tahun 2017. Sedangkan pada pemilu sebelumnya partai ini memperoleh 14,38% dan pada pemilu tahun 2017 memperoleh 11,94%. Selanjutnya, partai politik yang juga mengalami penurunan hasil *Zweitstimme* adalah partai *Andere*. Partai kecil ini mencapai 6,05% suara pada pemilu sebelumnya, dan pada pemilu tahun 2017 memperoleh 5,37% suara.

Partai politik yang mengalami kenaikan suara *Zweitstimme* pada pemilu tahun 2017 adalah Partai Hijau, Partai FDP (*Freie Demokratische Partei*), Partai AfD, dan partai politik *Die Linke*. Partai Hijau mengalami kenaikan suara sebesar 1,26%. Sedangkan pada pemilu sebelumnya mendapatkan 13,44% suara, dan pada pemilu tahun 2017 mendapatkan 14,70% suara. Selanjutnya, Partai FDP pada pemilu sebelumnya memperoleh 5,05%, dan pada pemilu tahun 2017 mendapatkan 11,59%. Kenaikan Partai FDP mencapai 6,54%. Selisih ini merupakan peningkatan tertinggi bila dibandingkan dengan Partai Hijau, Partai AfD, dan Partai *Die Linke*. Kemudian dari Partai AfD, hasil *Zweitstimme* partai ini mencapai 9,23% pada pemilu tahun 2017. Sedangkan pada pemilu tahun 2013 hanya memperoleh 3,83% suara. Peningkatan hasil suara partai ini bila dibandingkan dengan pemilu tahun 2013 mendapatkan 5,4% suara. Partai *Die Linke* mengalami peningkatan sebesar 0,92%, 3,55% suara pada pemilu tahun 2013, dan 4,47% suara pada pemilu tahun 2017.

Adanya penurunan dan kenaikan dari pemilih partai politik di Jerman, juga dapat di jelaskan melalui perpindahan suara dari keenam partai politik yang mendominasi. Berikut ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan adanya perpindahan suara partai pada pemilu tahun 2017.



Gambar 3.12 Perpindahan Suara Partai Politik Union 2017

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>.
Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Dalam gambar, perpindahan suara pemilih Union (*Christlich Demokratische Union (CDU)* dan *Christlich Soziale Union*) cenderung lebih banyak yang keluar dari partai ini daripada yang memilih untuk mendukung. Hal ini dilihat dari arah tanda panah yang berwarna hitam, dari Union keluar menuju partai-partai politik lain yang berada di sebelah kanan dalam gambar diatas. Perpindahan suara pemilih yang keluar dari Union bila dijumlahkan mencapai sekitar 2.520.000 pemilih. Antara lain 90.000 konstituen memilih untuk mendukung Partai *Die Linke* pada pemilihan umum tahun 2017. Kemudian 30.000 konstituen juga memilih untuk keluar dan mendukung Partai Hijau. Perpindahan suara tertinggi yang tidak lagi memilih Union dalam pemilu tahun 2017 adalah konstituen yang beralih mendukung Partai FDP (*Freie Demokratische Partei*) dengan perolehan sebesar 1.360.000 konstituen. Angka tersebut merupakan perpindahan suara tertinggi bila dibandingkan dengan jumlah konstituen yang beralih untuk memilih partai-partai politik lain. Sedangkan konstituen yang beralih memilih Partai AfD sebagai partai yang menempati urutan ketiga dalam parlemen berjumlah sekitar

980.000 suara. Tanda minus angka dalam gambar diatas menunjukkan jumlah konstituen yang keluar dari Union.

Dalam gambar, juga terlihat adanya arah tanda panah yang masuk menuju Union, itu merupakan jumlah suara yang beralih untuk mendukung Union pada pemilu tahun 2017. Pendukung tersebut berasal dari konstituen Partai SPD (*Sozialdemokratische Partei Deutschland*) yang menyumbang sekitar 20.000 suara. Selain itu, gambar diatas menunjukkan perpindahan suara dari partai politik kecil (cenderung kurang mendominasi di *Bundestag*) yang berjumlah 380.000 suara. Angka tersebut merupakan perpindahan jumlah suara terbesar yang menyumbang Union. Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan maka akan menghasilkan 400.000 suara. Dengan demikian, perpindahan suara fraksi Union (*Christlich Demokratische Union (CDU)*, dan *Christlich Soziale Union*) dalam pemilu tahun 2017, lebih besar jumlah konstituen yang keluar daripada jumlah suara yang masuk mendukung partai ini.



Gambar 3.13 Perpindahan Suara Partai SPD 2017

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Sedangkan Partai SPD (*Sozialdemokratische Partei Deutschland*) memiliki hal yang serupa. Perpindahan suara lebih banyak yang beralih dari partai ini. Sebagian besar pendukung yang keluar lebih memilih Partai AfD sebanyak 470.000 suara. Angka tersebut merupakan jumlah perpindahan suara terbesar

yang beralih dari partai ini. Selain beralih menuju Partai AfD, konstituen juga beralih menuju partai-partai politik lain. Antaranya, 20.000 suara beralih ke fraksi Union (*Christlich Demokratische Union (CDU)*, dan *Christlich Soziale Union*), 430.000 suara lebih memilih Partai *Die Linke*, 380.000 suara beralih ke Partai Hijau (*Die Grünen*), 450.000 suara beralih menuju Partai FDP, dan 10.000 suara memilih partai politik Andere.

Kemudian dalam gambar diatas menunjukkan perpindahan suara menuju Partai SPD berasal dari konstituen Partai Nichtwähler sebesar 360.000 suara. Partai Nichtwähler merupakan partai politik di Jerman yang cenderung kurang mendominasi dalam perpolitikan disana. Perpindahan suara yang keluar dari Partai SPD apabila dijumlahkan keseluruhan mencapai 1.760.000 suara. Dengan demikian, perpindahan suara Partai SPD lebih banyak jumlah konstituen yang keluar daripada jumlah konstituen yang masuk dan memilih partai ini pada pemilihan umum tahun 2017.



Gambar 3.14 Perpindahan Suara Partai FDP 2017

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Perpindahan suara pendukung Partai FDP (*Freie Demokratische Partei*) cenderung sedikit yang memilih untuk keluar dan mendukung partai lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanda panah yang digambarkan menuju ke arah Partai FDP, menandakan banyaknya konstituen yang memilih partai ini pada pemilu

2017. Terdapat 1.360.000 suara yang masuk ke Partai FDP. Angka tersebut berasal dari fraksi Union (*Christlich Demokratische Union (CDU)*, dan *Christlich Soziale Union*). Itu merupakan angka tertinggi yang menyumbang jumlah perpindahan suara ke Partai FDP. Sedangkan perpindahan suara dari Partai SPD menuju Partai FDP memperoleh 450.000 suara. Selain itu, Partai *Die Linke* juga menyumbang 60.000 suara dari konstituennya. Perpindahan suara dari Partai Hijau menuju Partai FDP sebesar 110.000 suara konstituen. Kemudian perpindahan suara dari partai politik Nichtwähler dan Andere masing-masing menyumbang 700.000 dan 140.000 suara konstituen.

Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa jumlah konstituen yang keluar untuk mendukung partai lain sebesar 40.000 suara. Suara tersebut beralih menuju Partai AfD yang nasionalis. Kemudian, apabila perpindahan suara yang masuk dari partai lain menuju Partai FDP di jumlahkan keseluruhan, maka akan menghasilkan 2.820.000 suara konstituen. Oleh karena itu, pada pemilihan umum tahun 2017 perpindahan suara Partai FDP lebih banyak suara yang masuk mendukung partai ini daripada jumlah suara konstituen yang keluar memilih partai lain.



Gambar 3.15 Perpindahan Suara Partai Hijau 2017

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Perpindahan jumlah suara yang mendukung Partai Hijau lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah suara yang keluar. Pendukung yang memilih partai ini dalam pemilu tahun 2017 cenderung lebih banyak berasal dari pendukung yang sebelumnya memilih Partai SPD (*Sozialdemokratische Partei Deutschland*). Perpindahan suara dari Partai SPD menuju ke Partai Hijau menyumbang sekitar 380.000 suara. Sedangkan perpindahan suara dari Union sekitar 30.000 suara konstituen. Kemudian 230.000 suara untuk Partai FDP diperoleh dari perpindahan pendukung partai politik Nichtwähler. Jumlah total perpindahan suara yang masuk ini mencapai 640.000 suara.

Sedangkan suara konstituen yang keluar dari Partai Hijau mencapai 360.000 suara. Antaranya, 170.000 beralih menuju Partai *Die Linke*. Dalam gambar diatas, angka tersebut merupakan suara konstituen tertinggi yang keluar dari Partai Hijau. Selanjutnya perpindahan suara yang keluar dari Partai Hijau menuju Partai FDP sebesar 110.000 suara, 40.000 menuju Partai AfD, dan 40.000 suara menuju partai politik Andere. Dalam penjelasan diatas menunjukkan bahwa jumlah konstituen yang masuk lebih besar daripada jumlah konstituen yang keluar memilih partai lain dalam pemilu tahun 2017.



Gambar 3.16 Perpindahan Suara Partai AfD 2017

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) berhasil menempati posisi ketiga dalam kursi parlemen (*Bundestag*). Hal ini mengingat perpindahan jumlah suara yang berada di gambar atas menunjukkan bahwa partai ini memiliki pendukung baru yang dahulu memilih partai lain. Kondisi ini merupakan capaian dan keuntungan yang baik bagi Partai AfD. Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa tidak ada gambar arah anak panah yang keluar dari Partai AfD menuju partai-partai politik lain di Jerman. Hal ini berarti, tidak ada pendukung dari Partai AfD yang keluar.

Sedangkan perpindahan suara yang masuk untuk mendukung partai ini di dominasi oleh konstituen yang sebelumnya mendukung Partai Nichtwähler sebanyak 1.200.000 suara. Partai yang kurang mendominasi dalam *Bundestag* ini menyumbang jumlah suara konstituen tertinggi. Posisi kedua, perpindahan suara dari Union menuju Partai AfD sebesar 980.000 suara. Sedangkan 470.000 suara berpindah Partai SPD menuju Partai AfD, 400.000 suara konstituen dari Partai *Die Linke*, 40.000 suara dari Partai Hijau, 40.000 suara dari Partai FDP, dan 690.000 suara konstituen dari Partai Andere menuju Partai FDP. Apabila semua perolehan tersebut dijumlahkan maka akan menghasilkan 3.820.000 suara konstituen yang masuk. Jadi, perpindahan suara dari Partai AfD menuju partai-partai politik lain adalah 0 suara. Dengan demikian, perpindahan suara yang masuk menuju Partai AfD lebih besar daripada suara konstituen yang keluar.



Gambar 3.17 Perpindahan Suara Partai *Die Linke* 2017

(Sumber: Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Begitu juga dengan perpindahan jumlah suara pada Partai *Die Linke*. Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah pendukung partai ini lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah suara yang keluar dan tidak memilih partai ini. Diantaranya 90.000 suara konstituen dari Union memilih untuk mendukung Partai *Die Linke* pada pemilihan umum tahun 2017. Kemudian, 430.000 perpindahan suara dari Partai SPD, 170.000 dari Partai Hijau, dan 270.000 dari Partai Nichtwähler. Perpindahan suara dari Partai SPD menuju Partai *Die Linke* merupakan perpindahan suara tertinggi. Hal itu dapat dilihat dari gambar diatas. Apabila dijumlahkan, perpindahan suara yang masuk menuju partai ini mencapai 960.000 konstituen.

Sedangkan perpindahan suara yang keluar, dari Partai *Die Linke* menuju partai-partai politik lain bila dijumlahkan mencapai 510.000 konstituen. Antaranya, 60.000 konstituen beralih menuju Partai FDP, 400.000 beralih menuju Partai AfD, dan 50.000 konstituen menuju Partai Andere. Dengan demikian, perpindahan suara dari Partai *Die Linke* yang masuk lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah perpindahan suara yang keluar.

Dari penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa jumlah kehadiran penduduk yang berpartisipasi dalam pemilu yang dilaksanakan pada bulan September 2017 berjumlah 46.973.799 jiwa. Jumlah tersebut merupakan 76,2%

dari jumlah total penduduk Jerman. Namun jumlah diatas, memiliki tingkat partisipasi yang mengalami kenaikan sebesar 5% bila dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat Jerman pada pemilihan umum sebelumnya.

Selain itu, hasil akhir pemilihan umum pada 2017 menunjukkan bahwa Union (*Christlich Demokratische Union (CDU)* dan *Christlich Soziale Union*) memenangkan pemilu pada urutan teratas dengan perolehan 32,9% suara. Pada urutan kedua di menangkan oleh Partai SPD sebagai partai yang mendominasi di *Bundestag* dengan 20,5% suara. Selanjutnya di susul oleh Partai AfD dengan 12,6% suara. Adanya perolehan tersebut dapat menentukan total jumlah kursi di *Bundestag* sebanyak 709 kursi. Setengah kursi diisi dengan kandidat partai yang dipilih secara langsung di setiap distrik. Sedangkan sisanya menggunakan sistem proporsional dan kandidat di tentukan oleh setiap partai-partai politik.

Hasil akhir pemilu dalam persentase diatas, bila hitung berdasarkan jumlah kursi di *Bundestag*, maka fraksi Union menempati 246 kursi, 153 kursi untuk Partai SPD, 94 kursi Partai AfD, 80 kursi Partai FDP, 69 kursi Partai *Die Linke*, dan 67 kursi Partai Hijau. Hasil pemilu tersebut juga memenangkan Angela Merkel untuk kembali memerintah dan menjabat sebagai Kanselir Jerman hingga tahun 2021 mendatang.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, pemilu Jerman yang dilakukan pada bulan September 2017 dimenangkan oleh fraksi Union (*Christlich Demokratische Union (CDU)* dan *Christlich Soziale Union*) yang memperoleh 246 kursi. Kemudian Partai SPD 153 kursi, Partai AfD 94 kursi, Partai FDP 80 kursi, Partai *Die Linke* memperoleh 69, dan Partai Hijau 67 kursi *Bundestag*. Jumlah total kursi mencapai 709 kursi *Bundestag* pada pemilu periode tahun 2017.

Perolehan Union dalam *Bundestag* yang belum mencapai 50% dari total suara membuat Partai CDU harus berkoalisi. Terdapat 7 kemungkinan koalisi untuk mencapai suara mayoritas. Alternatif koalisi tersebut adalah Union-AfD-*Die Linke*, Union-Partai Hijau-AfD, Union-AfD-FDP, Union-FDP-*Die Linke*, dan Union-*Die Linke*-Partai Hijau. Namun demikian, koalisi ini cenderung terhambat dan tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan perbedaan antar partai. Fraksi Union merupakan partai politik berhaluan demokrasi liberal atau partai kanan-tengah di Jerman. Ideologi ini cenderung menganut nilai-nilai kebebasan, solidaritas, dan keadilan. Fraksi ini mendukung kebebasan beragama dan solidaritas terhadap pengungsi di Jerman. Sedangkan Partai AfD adalah partai sayap kanan yang cenderung radikal. Selain itu partai ini juga mengusung gerakan anti-Islam dan anti-pengungsi. Dengan demikian, perdebatan kebijakan menghambat Partai SPD untuk berkoalisi dengan Partai AFD. Hambatan lain juga muncul terhadap kemungkinan koalisi Partai *Die Linke* dan fraksi Union. Fraksi Union yang tengah-kanan, dan partai *Die Linke* atau Partai Kiri yang menganut ideologi sosialis demokratik, cenderung memiliki platform partai yang anti pada kapitalisme, dan anti privatisasi.

Selanjutnya, dua kemungkinan lain adalah kemungkinan koalisi Union-SPD (*Grand Coalition*), dan Union-FDP-Partai Hijau (Koalisi Jamaika). Namun pasca pemilu 2017, hambatan fraksi Union dengan Partai SPD terlihat saat Martin Schultz menyatakan bahwa partainya memilih menjadi partai oposisi. Selain itu,

kedua partai tidak sepakat terkait hak buruh dan jaminan kesehatan. Sedangkan kemungkinan “Koalisi Jamaika” antara fraksi Union-FDP-Partai Hijau juga memiliki hambatan dalam berkoalisi. Hal ini disebabkan oleh Partai FDP yang meninggalkan perundingan karena adanya ketidaksepakatan terkait kebijakan energi dan iklim. Partai FDP memandang keempat mitra diskusi tersebut tidak memiliki kesamaan visi dalam rencana kebijakan energi di Jerman.

Namun demikian, akhirnya koalisi dapat tercapai antara fraksi Union dan Partai SPD. Kondisi itu terjadi karena adanya beberapa kesepakatan, seperti pembatasan pengungsi yang memasuki Jerman menjadi 1000 per bulan. Kemudian adanya alokasi jabatan menteri yang diberikan kepada Partai SPD. Seperti, menteri luar negeri, menteri ketenagakerjaan, dan menteri keuangan yang seharusnya dipegang oleh partai pemenang pemilu. Berdasarkan hasil koalisi tersebut, Partai CDU dan Angela Merkel cenderung terlihat sedikit mengabaikan tujuan partainya demi mewujudkan koalisi dengan Partai SPD. Pihaknya bersedia merelakan jabatan menteri, terutama posisi menteri keuangan untuk diambil alih oleh *partner* koalisinya, yaitu Partai SPD.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang, Cipto. 2000. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bischoff, Matthias, Eric Chauvistré. 2015. *Tatsachen über Deutschland*. Berlin: Frankfurter Societäts-Medien GmbH.
- Capra, Fritjof. dan Charlene Spretnak. 1984. *Green Politics : The Global Promise*. Hutchinson & Co Ltd. London.
- Deutscher Bundestag. 2014. *Basic Law: for the Federal Republic of Germany*. Berlin: Germany Bundestag.
- Donald P. Kommers. 1997. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Durham and London: Duke University Press.
- Faisal. S. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- German Federal Foreign Office. 2008. *Facts about Germany*. Berlin: Societäts-Verlag, Frankfurt/Main, in collaboration with the German Federal Foreign Office.
- Gies, Ludwig. 2015. *Basic Law for the Federal Republic of Germany*. German Bundestag, Berlin.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Edited by M.S Khadafi dan Lolita. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jaggard, Lyn. 2007. *The Reflexivity of Ideas in Climate Change Policy : German, European and International Politics*. dalam Paul G. Harris (ed), *Europe and Global Climate Change. Politics, Foreign Policy and Regional Cooperation*. German: European and.

Jaggard, Lyn. 2007. *Climate Change Politics in Europe: Germany and the International Relations of the Environment*. London: Tauris Academic Studies.

Konrad Reuter. 2009. *The Bundesrat and Federal System (14th Edition)*. Berlin: Secretary General of the *Bundesrat*.

Lijphart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Karya ilmiah

Pridham, Geoffrey. *Coalition Behaviour and Party Systems in Western Europe: A Comparative Approach*. 1987 dalam Tesis Sri Budi Eko Wardani.

Jurnal

Frank Feulner. 2005. Menguatkan Demokrasi Perwakilan di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap DPD. *Jurnal Jentera*: Edisi 8 Tahun III.

Surat Kabar Cetak

Koran harian Kompas. 2005. *Merkel gagal tarik Partai Hijau untuk koalisi*. 24 September 2005.

Koran harian Kompas. 2017. *Merkel di Atas Angin*. 25 September 2017.

Koran Harian Kompas. 2017. *Dilema Angela Merkel*. 30 September 2017.

Artikel dari Internets

BBC. 2015. Angela Merkel criticised over crying refugee. <https://www.youtube.com/watch?v=9qaxoX9MF0M>. [Diakses pada tanggal 10 April 2018].

- 2015. Slowakia hanya akan menerima pengungsi Kristen. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150819_dunia_slowakia_kristen. [Diakses pada tanggal 14 April 2018].
- 2015. Merkel: Uni Eropa harus bersama atasi migran. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150831_dunia_merkel_migran. [Diakses pada tanggal 16 April 2018].
- 2017. Partai Kanan AfD Tetapkan Islam Tak Cocok Dengan Budaya Jerman. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39690063>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- 2017. Pemilu Jerman: Merkel menang lagi tapi Partai anti Islam dapat kursi. www.BBC.Indonesia.com. [Diakses pada tanggal 11 Oktober 2017].
- Berdikarionline. 2017. Partai Kiri Berkuasa di Negara Bagian Jerman. <http://www.berdikarionline.com/partai-kiri-berkuasa-di-negara-bagian-jerman/>. [Diakses pada tanggal 12 Februari 2018].
- Berita Satu. 2017. Gagal Bentuk Koalisi, Merkel Ingin Pemilu Ulang. <http://www.beritasatu.com/dunia/464609-gagal-bentuk-koalisi-merkel-ingin-pemilu-ulang.html>. [Diakses pada tanggal 16 Januari 2018].
- Bundestag. 2005. Basic Law for the Federal Republic of Germany. Article 21 dari www.bundestag.de/htdocs_e/parliament/function/legal/germanbasiclaw.pdf. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2018].
- Cleanenergywire. 2018. Pengamatan Koalisi: Pembuatan Pemerintahan Baru Jerman. <https://www.cleanenergywire.org/news/coalition-watch-road-new-german-government>. [Diakses pada tanggal 8 Juli 2018].
- DW. 2009. Pemenang Sudah Diketahui, Perundingan Koalisi Dimulai. https://www.dw.com/image/4730077_7.jpg 4-7-2018. [Diakses pada tanggal 5 Juli 2018].

- 2010. Peran Presiden Jerman. <http://m.dw.com/id/peran-presiden-jerman-kekuasaan-kecil-tapi-pekerjaan-ribet/a-5745848>. [Diakses pada tanggal 11 Oktober 2017].
- 2013. Jerman Memilih. <https://www.dw.com/id/jerman-memilih/a-17105378> . [Diakses pada tanggal 4 Juli 2018].
- 2013. SPD Akan Tuntut Upah Minimum. <http://www.dw.com/id/spd-akan-tuntut-upah-minimum/a-17116831>. [Diakses pada tanggal 21 April 2018].
- 2015. Merkel: "Islam Bagian dari Jerman". <http://www.dw.com/id/merkel-islam-bagian-dari-jerman/a-18187345>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- 2015. Warga Jerman Mulai Tolak Pengungsi?. <http://www.dw.com/id/warga-jerman-mulai-tolak-pengungsi/a-18763584>. [Diakses pada tanggal 12 April 2018].
- 2016. Tajuk: Krisis Pengungsi Mengubah Jerman. <http://www.dw.com/id/tajuk-krisis-pengungsi-mengubah-jerman/a-19522847>. [Diakses pada tanggal 16 April 2018].
- 2017. Analisis Pemilu Jerman: Frustrasi Walaupun Merkel Menang. <http://www.dw.com/id/analisis-pemilu-jerman-frustrasi-walaupun-merkel-menang/a-40665335>. [Diakses pada tanggal 24 Januari 2018].
- 2017. CDU dan SPD Sepakat Mulai Konsultasi Pra-Koalisi. <http://www.dw.com/id/cdu-dan-spd-sepakat-mulai-konsultasi-pra-koalisi/a-41609258>. [Diakses pada tanggal 18 April 2018].
- 2017. Germany's political parties CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Left party, Greens - what you need to know. <http://www.dw.com/en/germanys-political-parties-cdu-csu-spd-afd-fdp-left-party-greens-what-you-need-to-know/a-38085900>. [Diakses pada tanggal 23 Maret 2018].
- 2017. Merkel Tolak Batasi Jumlah Pengungsi. <http://www.dw.com/id/merkel-tolak-batasi-jumlah-pengungsi/a-39715952>. [Diakses pada tanggal 5 Mei 2018].

- 2017. Menjajaki Koalisi Besar Jilid II. <http://www.dw.com/id/menjajaki-koalisi-besar-jilid-ii-bagaimana-membangun-saling-percaya/a-41596123>. [Diakses pada tanggal 22 Mei 2018].
- 2017. Pembentukan Pemerintah Koalisi Jerman: Seni Kompromi Tingkat Tinggi. <http://www.dw.com/id/pembentukan-pemerintah-koalisi-jerman-seni-kompromi-tingkat-tinggi/a-40668959>. [Diakses pada tanggal 7 Mei 2018].
- 2018. Angela Merkel: ‘Perbedaan Serius’ Tetap Mewarnai Perundingan Koalisi. <http://www.dw.com/id/angela-merkel-perbedaan-serius-tetap-mewarnai-perundingan-koalisi/a-42437985>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- 2018. Pemerintahan Baru Jerman: 2/3 Anggota SPD Setujui Koalisi Besar Di Bawah Angela Merkel. <http://www.dw.com/id/pemerintahan-baru-jerman-2-3-anggota-spd-setujui-koalisi-besar-di-bawah-angela-merkel/a-42818282>. [Diakses pada tanggal 26 Mei 2018].
- 2018. Kanselir Jerman Angela Merkel: Saya Akan Memerintah Empat Tahun Penuh. <https://news.detik.com/dw/d-3863736/kanselir-jerman-angela-merkel-saya-akan-memerintah-empat-tahun-penuh>. [Diakses pada tanggal 26 Mei 2018].
- European Union. 2016. Country responsible for asylum application (Dublin). http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/index_en.htm. [Diakses pada tanggal 13 April 2018].
- Harian Nasional. 2017. Merkel Janjikan Pemerintahan Koalisi Terkuat. <http://www.harnas.co/2017/09/26/merkel-janjikan-pemerintahan-koalisi-terkuat>. [Diakses pada tanggal 4 Juli 2018].
- Hecht, D. 2015. Germany Shuts Its Open Door to Refugees. <http://observer.com/2015/11/germany-shuts-its-open-door-to-refugees/>. [Diakses pada tanggal 14 April 2018].

- Idntimes. 2018. Koalisi Jerman Tak Kunjung Jelas, Merkel Kembali Lakukan Perundingan. <https://news.idntimes.com/world/achmad-hidayat-alsair/angela-merkel-lakukan-perundingan-untuk-koalisi-jerman-c1c2/full>. [Diakses pada tanggal 16 Januari 2018].
- Internasional Kompas. 2017. Usai Hasil Gemilang, Partai Anti-Islam Dibayangi Perpecahan. <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/26/10552771/usai-hasil-gemilang-partai-anti-islam-dibayangi-perpecahan>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- Kompas. 2017. Hasil Pemilu 2017 Obrak-abrik Peta Kekuasaan di Berlin. <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/25/06331761/hasil-pemilu-2017-obrak-abrik-peta-kekuasaan-di-berlin>. [Diakses pada tanggal 7 Juli 2018].
- Koran Jakarta. 2017. Semua Partai Miliki Peluang Sama dalam Pemilu Jerman. <http://www.koran-jakarta.com/semua-partai-miliki-peluang-sama-dalam-pemilu-jerman/>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- Liputan6. 2017. Isu Energi Picu Keretakan Partai Koalisi Pro-Angela Merkel. <https://www.liputan6.com/global/read/3169187/isu-energi-picu-keretakan-partai-koalisi-pro-angela-merkel>. [Diakses pada tanggal 18 April 2018].
- 2017. Isu Energi Picu Keretakan Partai Koalisi Pro-Angela Merkel. <http://global.liputan6.com/read/3169187/isu-energi-picu-keretakan-partai-koalisi-pro-angela-merkel>. [Diakses pada tanggal 21 Januari 2018].
- Maglobal. 2018. Perjanjian Koalisi Jerman. <http://maglobal.com/wp-content/uploads/2018/02/mclarty-update-germany-coalition-agreement-feb-2018.pdf>. [Diakses pada tanggal 19 April 2018].
- Melanie Amann, Thomas Darnstadt, dan Dietmar Hipp. 2017. Is Germany's Parliamentary Hurdle Obsolete?. <http://www.spiegel.de/international/germany/experts-5-percent-parliamentary-hurdle-in-germany-should-be-lowered-a-925817.html>. [Diakses pada tanggal 09 Maret 2018].

- Mile, Razaline. 2017. Ideologi. <https://www.mindmeister.com/ru/772453263/ideologi-adalah-suatu-kumpulan-gagasan-ide-ide-dasar-keyakinan-serta-kepercayaan-yang-bersifat-sistema>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- News Detik. 2009. Jerman Turunkan Usia Pemilih. <http://news.detik.com/bbc-world/1644202/jerman-turunkan-usia-pemilih->. [Diakses pada tanggal 08 Maret 2018].
- NU. 2017. Jika Tak Terkait Pilkada Tak Usah Ikut-Ikut. www.nu.or.id. [Diakses pada tanggal 2 Juni 2018]
- Nusantara News. 2018. Partai Merkel Dipaksa Lakukan Koalisi “Tom and Jerry”. <https://nusantara.news/partai-merkel-dipaksa-lakukan-koalisi-tom-and-jerry/>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- Pressreader.2017.<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171121/281685435145423>. [Diakses pada tanggal 16 Januari 2018].
- Republika. 2017. Partai Antipengungsi Jerman Desak Hak Pencari Suaka Direvisi.<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/01/27/okektz366-partai-antipengungsi-jerman-desak-hak-pencari-suaka-direvisi>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- Setiawan. 2003. Sistem Politik Republik Federal Jerman. <https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/905/sistem-politik-republik-federal-jerman>. [Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017].
- Spark, Laura Smith., Stephanie Halasz, CNN. 2013. Jerman Angela Merkel menandatangani kesepakatan 'grand koalisi' dengan Sosial Demokrat. <https://edition.cnn.com/2013/11/27/world/europe/germany-coalition/index.html>. [Diakses pada tanggal 19 April 2018].
- Strack, Christoph. Presiden Jerman Ingatkan Semua Partai Akan Tugas Politik. <http://www.dw.com/id/presiden-jerman-ingatkan-semua-partai-akan-tugas-politik/a-41462211>. [Diakses pada tanggal 26 Mei 2018].

- Suara Karya. 2005. Pemilu Jerman, Angela Merkel Jadi Kanselir. <http://www.suarakarya-online.com>. [Diakses pada tanggal 5 Juli 2018].
- Sunarto, Nanang. 2017. Angela Merkel, Kanselir Jerman Empat Kali. <http://www.kbknews.id/2017/09/26/angela-merkel-kanselir-jerman-empat-kali/>. [Diakses pada tanggal 26 April 2018].
- Tatsachen ueber deutschland. Fakta Mengenai Jerman. 2015. https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/system/files/download/tatsachen_2015_ind.pdf. [Diakses pada tanggal 25 Maret 2018].
- Tempo.co. 2013. Partai Merkel Menangi Pemilu Jerman. <https://dunia.tempo.co/read/515703/partai-merkel-menangi-pemilu-jerman>. [Diakses pada tanggal 4 Juli 2018].
- 2017. Parlemen Jerman Resmi Akui Pernikahan Sejenis. <https://dunia.tempo.co/read/887977/parlemen-jerman-resmi-akui-pernikahan-sejenis>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- Theguardian. 2015. Mama Merkel: the compassionate mother of Syrian refugees. <http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2015/sep/01/mama-merkel-the-compassionate-mother-of-syrian-refugees>. [Diakses pada tanggal 14 April 2018].
- 2018. Partai Merkel kehilangan kementerian kunci dalam kesepakatan koalisi. <https://www.theguardian.com/world/2018/feb/07/germany-coalition-deal-cdu-spd-angela-merkel-martin-schulz>. [Diakses pada tanggal 7 Juli 2018].
- UNHCR. 2015. 2015 UNHCR regional operations profile – Europe. <http://www.unhcr.org/pages/4a02d9346.html>. [Diakses pada tanggal 13 April 2018].
- 2015. Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean. <http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php>. [Diakses pada tanggal 14 April 2018].

Veröffentlicht. 2018. 2005. 2013. 2018 – Was Union und SPD gewinnen und verlieren.

<https://www.welt.de/politik/deutschland/article173297949/Ressortverteilung-2005-2013-2018-Was-Union-und-SPD-gewinnen-und-verlieren.html>. [Diakses pada tanggal 3 Juli 2018].

Voaindonesia. 2017. Kanselir Jerman Capai Kesepakatan Soal Pembatasan Pengungsi. <https://www.voaindonesia.com/a/kanselir-jerman-capai-kesepakatan-soal-pembatasan-pengungsi/4062217.html>. [Diakses pada tanggal 21 Januari 2018].

Wahlen in Deutschland. 2017. <https://bundestagswahl-2017.com/>. [Diakses pada tanggal 12 Maret 2018].

Worldpolicy. 2016. What Is Proportional Representation. www.worldpolicy.org. [Diakses pada tanggal 28 Maret 2018].

Zeit. 2016. What Is Proportional Representation. www.worldpolicy.org. [Diakses pada tanggal 28 Maret 2018].

Zeit. 2018. Apa yang SPD dan Union rencanakan dalam 100 hari pertama Groko. <https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-03/grosse-koalition-spd-union-ziele>. [Diakses pada tanggal 2 Juli 2018].

-----2018. Apa yang Disepakati Oleh SPD dan Union. <https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-02/grosse-koalition-koalitionsvertrag-union-spd>. [Diakses pada tanggal 7 Juli 2018].